

GERAKAN SOSIAL BARU MELAWAN KERUSAKAN EKOLOGIS

**(Studi Kasus Gerakan Sosial WALHI Riau Terkait Kerusakan Ekologis
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Governance**

Oleh:
Yosi Vilantina
NIM. 135120500111032



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

ABSTRAK

Yosi Vilantina, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018, Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis. Tim Pembimbing: Wawan Sobari, S.IP, MA, Ph.D. Dan Wimmy Haliim, S.IP., M.Sos.

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana gerakan sosial baru yang dijalankan oleh WALHI Riau dan Pemerintah dalam mengatasi kerusakan ekologis yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini melibatkan masyarakat yang merasa pemerintah tidak segera menangani masalah kerusakan ekologis di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah positivis dimana pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru milik Pichardo dimana gerakan sosial baru secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan gerakan sosial lama yakni isu/tujuan, taktik, struktur, dan partisipan. Tujuan dari penelitian ini ialah penulis ingin memperkuat teori GSB yang dikemukakan oleh Pichardo. Hasil analisis dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa karakteristik dari GSB yang dijalankan oleh Gerakan Melawan Asap memiliki karakteristik yang sama dengan yang dikemukakan oleh Pichardo. Hasil penelitian ini adalah Gerakan Sosial Baru yang dijalankan oleh WALHI Riau memiliki karakteristik seperti yang disebutkan oleh Pichardo diantaranya tujuan/ideologi yang memberikan penekanan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup, kemudian taktik yang digunakan WALHI Riau dalam melakukan gerakan cenderung memilih berada di saluran politik normal dan memobilisasi opini publik, kemudian partisipan yang tergabung berasal dari berbagai kelas dan kalangan yang cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung oleh pengeluaran negara, sedangkan struktur yang terdapat dalam gerakan sosial melawan kerusakan ekologis diisi oleh staf WALHI Riau.

Kata Kunci: gerakan sosial baru, WALHI Riau, kerusakan ekologis.

ABSTRACT

Yosi Vilantina, Bachelor Degree, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University of Malang, 2018, New Social Movement Against Ecological Damage. Supervisor Team: Wawan Sobari, S.IP, MA, Ph.D. And Wimmy Haliim, S.IP., M.Sos.

This study identifies how the new social movements run by WALHI Riau and the Government in overcoming the ecological damage that occurred in Riau Province. This involves people who feel the government does not immediately deal with the problem of ecological damage in Riau Province. This type of research is positivist where data collection using primary data is interview, and documentation. The validity of the data using source triangulation. This study uses Pichardo's new social movement theory where the new social movements fundamentally have special characteristics that are different from the old social movements of issues / goals, tactics, structures, and participants. The purpose of this study is the authors want to strengthen the GSB theory proposed by Pichardo. The results of the analysis in this study the authors found that the characteristics of GSB run by the Movement Against Smoke have the same characteristics with that proposed by Pichardo. The result of this research is the New Social Movement run by WALHI Riau has characteristic as mentioned by Pichardo such as the aim / ideology which give emphasis to the quality of life and lifestyle, then the tactics used by WALHI Riau in doing the movement tend to choose to be in the political channel normandan mobilizing public opinion, and then joining participants from various classes and people who tend to work in an area that is very dependent on state expenditure, while the structure contained in the soisal movement melwan ecological damage filled by WALHI Riau staff

Keywords: new social movement, WALHI Riau, ecological damage.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis (Studi Kasus Gerakan Sosial WALHI Riau Terkait Kerusakan Ekologis Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata Satu) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menyelesaikannya dengan semangat, usaha yang gigih dan keyakinan yang kuat, dimana semangat tersebut tumbuh atas dukungan-dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat Yang Maha Agung dan Kuasa yang selalu memberikan jalan dan petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Parwoto dan Ibu Narsun Sukarlin. Dan kedua adik penulis Anggi Rahmansyah dan Fu'ad Abdul Khooir, serta keluarga besar penulis yang sangat Penulis cintai yang menjadi penyemangat dan motivasi terbesar dalam mencapai keberhasilan studi, dengan segala doa dan dukungan moril maupun materiil kepada penulis semoga kelak penulis mencapai segala yang

diharapkan sebagai bentuk bakti kepada keluarga tercinta.

3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, sekaligus kepada Bapak Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Bapak Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Wimmy Haliim, S.IP., M.Sos. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan ketersediaannya untuk menuntun dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D dan Bapak Faqih Alfian, S.IP., M.IP. Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang bertujuan untuk membangun sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Mas Budi dan Mas Luthfi selaku bagian administrasi Prodi Ilmu Politik yang banyak sekali membantu dalam proses pembuatan surat-menysurat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
8. Direktur Eksekutif Wahana lingkungan Hidup Indonesia Riau, yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau lainnya yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan skripsi ini.
10. Ketua Komunitas Desa Pungkat dan warga Desa Pungkat yang enggan disebutkan namanya yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Fiki dan Bapak Iwan selaku staf BPBD yang telah bersedia memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sebagai bahan utama dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat yang menjadi keluarga Penulis selama Penulis di Malang; Enkha Sintya Wulandira, Ulvia Noer Ayunina, Bella Nindya, Dinda Asri, Hutami Riauli Grace Purba, Nitya Wisal Yakarini, Vanda Ika Paramitha, Mira Azra, Suharyani, Timotius Lubis, Tri Selli Martianti, Nittor Adhelia, Amirul, Aries Luthfi, Grace Rebecca, Muntaha, Chelsye, Achmad Rian Abimanyu, Anton Prakoso, Hanifah Nurcahyani, Prima Dina Muallifah, Septian Satria Yudha, Swandy Tambunan, dan teman-teman serta sahabat Penulis yang lainnya.
13. Luqman Nur Hakim yang selalu memberikan doa dan support kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini sehingga Penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Mas Johan yang telah bersedia membantu Penulis memberikan semangat mulai dari awal Penulis mahasiswa baru sampai sekarang sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh

semangat dan tidak menyerah.

15. Bapak Sujiono dan Ibu Elly Rahmawati yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

16. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2013 Universitas Brawijaya Malang serta kepada seluruh pihak yang terlibat memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

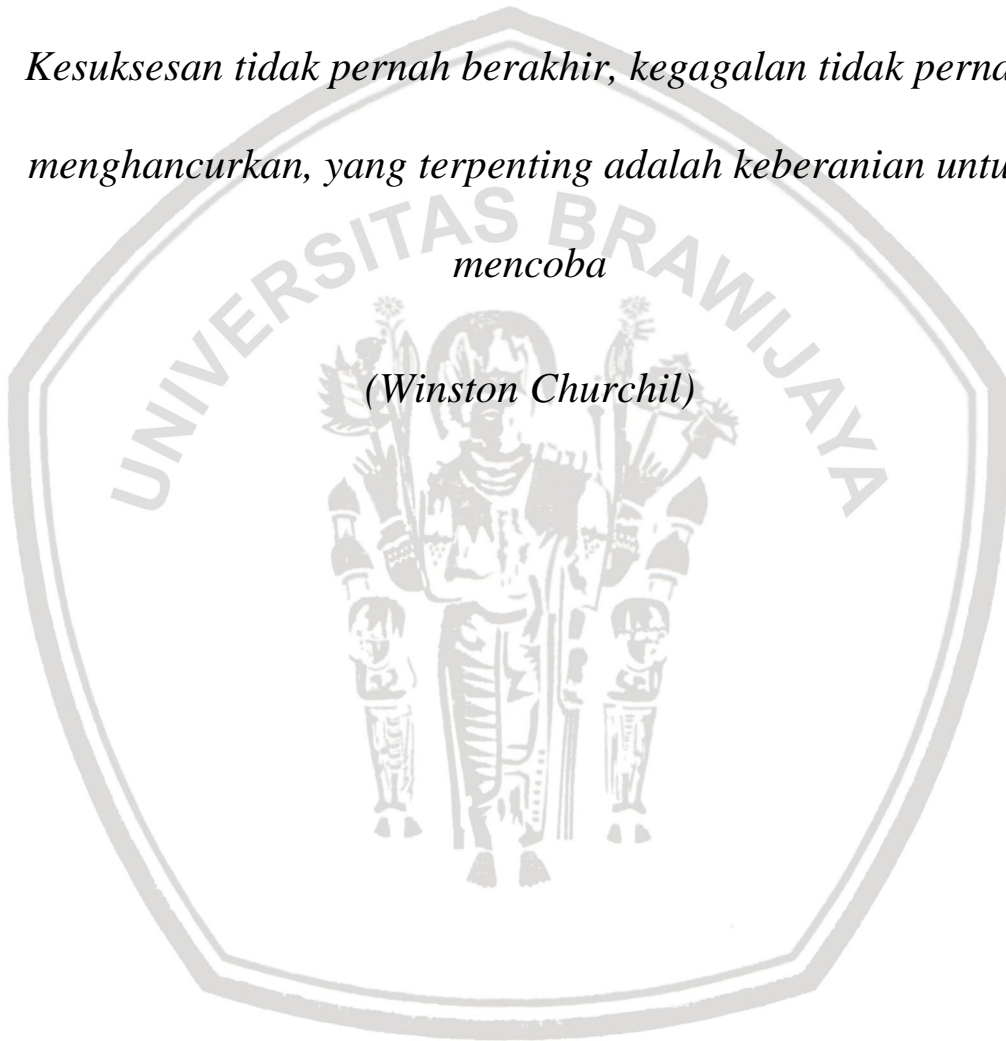
Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penelitian skripsi yang disusun oleh penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan semoga melalui skripsi ini penulis dan para pembaca dapat berproses lebih baik.

Malang, 21 Mei 2018

MOTTO

*Kesuksesan tidak pernah berakhir, kegagalan tidak pernah
menghancurkan, yang terpenting adalah keberanian untuk
mencoba*

(Winston Churchill)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Objektif	11
1.3.2. Tujuan Subjektif.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis	12
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1. Kerangka Konseptual	13
2.1.1. Gerakan Sosial Baru.....	13
2.1.2. Kerusakan Ekologis	22
2.1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Kerangka Berpikir.....	32
 BAB III: METODE PENELITIAN.....	 34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Fokus Penelitian	35
3.3. Lokasi dan Subjek penelitian	35
3.4. Teknik Pemilihan Informan	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38

3.6. Analisis Data	41
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	42
BAB IV: WALHI RIAU DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	43
4.1. Gambaran Umum Kebakaran Hutan dan Lahan	43
4.1.1. Kesengajaan Pembakaran Hutan oleh Perusahaan Tertentu	43
4.1.2. Gambaran Konflik Masyarakat dengan Perusahaan perkebunan	47
4.1.3. Penerbitan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3)	50
4.1.4. Gambaran Umum Gerakan Melawan Kerusakan Ekologis	53
BAB V: GERAKAN SOSIAL WALHI DALAM MELAWAN KERUSAKAN	
 EKOLOGIS	58
5.1. Gerakan Sosial Baru WALHI Riau Melawan Kerusakan Ekologis	58
5.2. Dampak Gerakan Sosial Baru WALHI Riau terhadap Masyarakat dan Pemerintah daerah	68
5.3. Faktor Keberhasilan Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis	79
5.4. Faktor Penghambat Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis	81
BAB VI: PENUTUP	84
6.1. Kesimpulan	84
6.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR ISTILAH

CIFOR	: Center for International Forestry Research
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
Degradasi	: Penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Drainase	: pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
Ekspansi	: Perluasan sebuah lahan atau wilayah
Emergency Response	: Respon Darurat
Gerakan Feminisme	: Gerakan Perempuan
Greenpeace	: Suatu lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan global
Ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
Hlm	: Halaman
Hotspot	: Titik Api
HPH	: Hak Pengusaha Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut

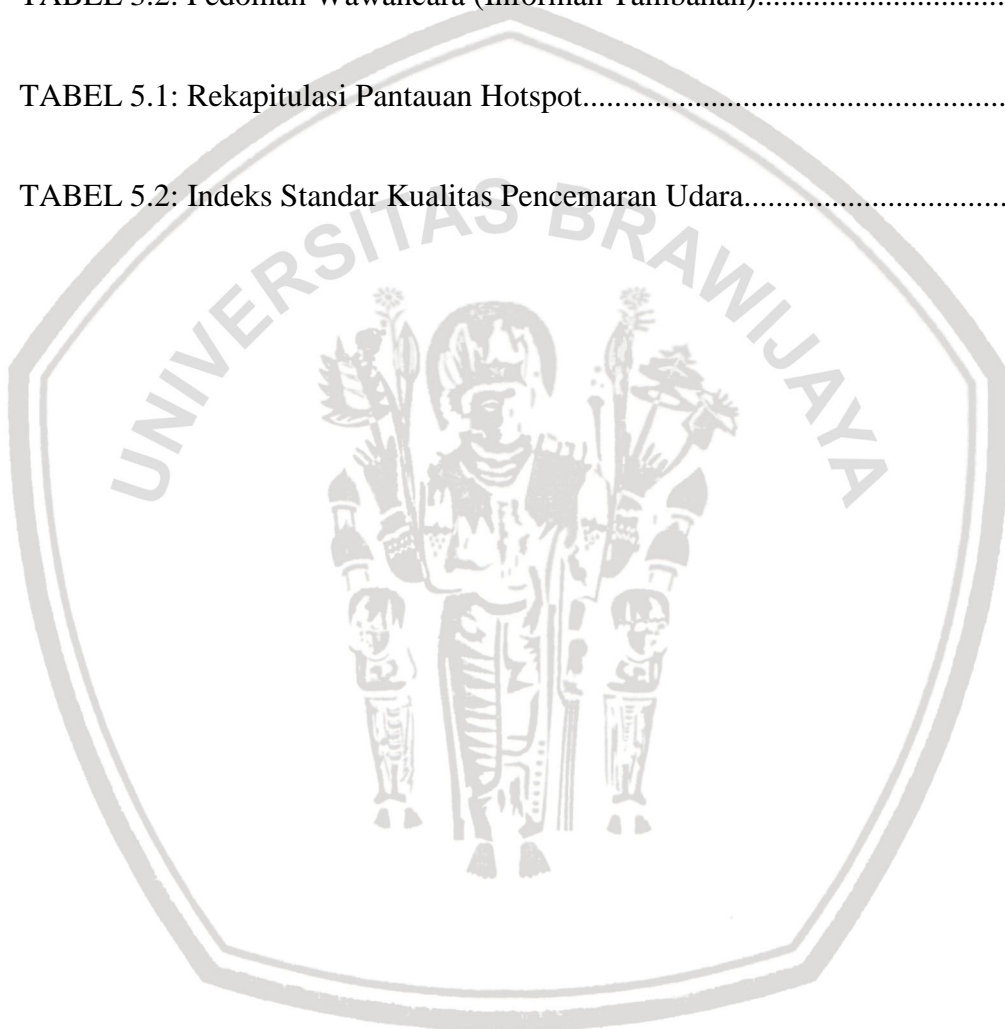
ISPU	: Indeks Standar Pencemaran Udara
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
Kanal	: Saluran air
Karbon	: Zat yang merupakan unsur kimia
Kerusakan Ekologis	: Kerusakan Lingkungan
KLHK	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Korporasi	: Badan Usaha yang sah dan sudah memiliki hukum
Lahan Gambut	: bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik
Land Clearing	: Cara pembersihan lahan dengan cara pembakaran
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Monokultur	: Salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal
NGO	: Non-Governmental Organization
Oligarki	: Bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
Okupasi	: Pendudukan atau penguasaan
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
Otonomi	: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Perkebunan Swasta	: Perkebunan milik Asing
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Permentan	: Peraturan Menteri Kehutanan
SP3	: Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara
Status Quo	: Keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.
Tindakan Kolektif	: Sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang.
Tanah Mineral	: Suatu tanah normal yang tersusun atas lapisan-lapisan, permukaan (top soil), lapisan bawah permukaan (subsoil) dan lapisan bawah (substratum).
Volunteer	: Sukarelawan
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indoensia
WWF	: World Wide Fund for Nature

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1: Penelitian Terdahulu	27
TABEL 3.1: Pedoman Wawancara (Informan Kunci).....	40
TABEL 3.2: Pedoman Wawancara (Informan Tambahan).....	41
TABEL 5.1: Rekapitulasi Pantauan Hotspot.....	72
TABEL 5.2: Indeks Standar Kualitas Pencemaran Udara.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Sebaran Perizinan diatas Lahan Gambut.....	5
Gambar 1.2: Sisa Tutupan Kawasan Hutan di Riau.....	6
Gambar 4.1: Pembersihan Hutan Dengan Cara Dibakar.....	45
Gambar 4.2: Pembersihan Hutan Dengan Cara Penebasan.....	46
Gambar 4.3: Gerakan Aksi Masyarakat di Depan Kantor Gubernur dan Polda Riau.....	52
Gambar 4.4: Gerakan aksi masyarakat Menuntut Penolakan SP3 di Depan Kantor Polda Riau.....	53
Gambar 4.5: Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Menunjukkan Kualitas Udara Dalam Level Berbahaya.....	55
Gambar 4.6: Data masyarakat yang terserang penyakit akibat kabut asap.....	56
Gambar 5.1: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau saat memperingati Hari Bumi.....	59
Gambar 5.2: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau bersama masyarakat melakukan aksi demo.....	60
Gambar 5.3: Akun <i>Facebook</i> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.....	62
Gambar 5.4: Akun <i>Twitter</i> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.....	62
Gambar 5.5: Akun <i>Youtube</i> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.....	63
Gambar 5.6: Masyarakat ikut menyuarakan aksi protes terhadap pemerintah.....	70

Gambar 5.7: Masyarakat melakukan aksi melawan kerusakan ekologis.....70

Gambar 5.8: Pembagian masker gratis kepada pengendara motor.....79



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Kerangka Berpikir.....	27
Bagan 5.1: Struktur Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera, yaitu 4,044 juta Ha.¹ Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya keberadaan industri perkebunan di Provinsi Riau yang menjadi penyebab dari degradasi hutan alam yang semakin tidak terkendali. Dampaknya, semakin berkurangnya areal hutan rawa gambut. Keadaan geografis Provinsi Riau memang berpotensi di pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit.²

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau pada akhir tahun 2015 sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dalam rangka untuk usaha pertanian maupun perkebunan. Penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan seringkali disebabkan oleh kegiatan manusia yang sengaja membuka lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau kehutanan secara ilegal ataupun akibat kelalaian dalam penggunaan api. Sebagian besar kawasan yang

¹ Catatan Jikalauhari “*Fakta Kritis Analisa Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Riau*” Diakses dari website: <http://jikalauhari.or.id/kabar/berita/fakta-kritis-analisa-tata-kelola-kehutanan-di-provinsi-riau/>, pada tanggal 17 April 2017 pukul 22:42

² Uul Wulandari, “*Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau*” diakses dari [http://www.academia.edu/8303058/PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROPINSI RIAU](http://www.academia.edu/8303058/PERKEMBANGAN_PERKEBUNAN_KELAPA_SAWIT_DI_PROPINSI_RIAU), pada tanggal 17 April 2017 pukul 22:57 WIB

terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber polusi asap dalam kebakaran hutan.³

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang paling luas di Indonesia.⁴ Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau secara nasional menempati posisi teratas di Indonesia dengan luas 2,2 juta Ha atau setara 25 persen dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.⁵ Tidak dapat disangkal bahwa kelapa sawit telah menjadi komoditas perkebunan penting yang menjadi pusat perhatian dalam pengembangannya dikarenakan tingkat konsumsi minyak kelapa sawit dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sejak dikembangkannya tanaman kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1960-an, luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang sangat pesat.⁶

Pertumbuhan pesat perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi pada kurun waktu 1990-1997, dimana terjadi penambahan luas areal tanam rata-rata 200.000 Ha setiap tahunnya, yang sebagian besar terjadi pada perkebunan swasta.⁷ Untuk perluasan kelapa sawit di dunia tahun 2011 hanya berkisar 12 juta hektare lebih dan sebanyak 8 juta hektare lebih ada di Indonesia.⁸ Di Indonesia, perluasan perkebunan kelapa sawit terbesar berada di Riau, Kalimantan dan Sulawesi. Dari

³ Vita Yulianti, Irdyanti (2016). "Peran Dinas Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan di Kota Pekanbaru" Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan. Vol.19, No.1, hlm. 2

⁴ Uul Wulandari, "Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau" diakses dari web: http://www.academia.edu/8303058/PERKEMBANGAN_PERKEBUNAN_KELAPA_SAWIT-DI_PROPINSI_RIAU, pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 18:02 WIB

⁵ Frislidia, "Perkebunan Sawit Riau Terluas di Indonesia" Antara News, diakses dari situs: <http://www.antaraneews.com/berita/382433/perkebunan-sawit-riau-terluas-di-riau-dan-indonesia> pada tanggal 17 April 2017 pukul 22:05 WIB

⁶ Masykur (2015), "Pengembangan dalam Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif dan Mengurangi Pemanasan Global" Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 2, hlm. 1

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., hlm. 2

12 juta hektare tersebut bisa menghasilkan sebanyak 140,6 juta ton konsumsi minyak kelapa sawit dan bisa memenuhi keperluan minyak nabati dunia yang mencapai 1.700.000 ton per tahunnya.⁹ Tingginya tingkat konsumsi minyak kelapa sawit ini berakibat pada semakin meluasnya pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan perubahan fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan di Indonesia. Sehingga kebakaran pada lahan gambut selalu terjadi dan berulang setiap tahunnya pada lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya tata kelola yang salah pada lahan gambut oleh perusahaan perkebunan yang merusak lingkungan. Banyak perusahaan perkebunan yang melakukan metode pembakaran untuk *land clearing* secara rapi dan sistematis.¹⁰ Bahkan kebun telah didesain sedemikian rupa sejak awal pembangunan, dengan tujuan agar pembakaran yang dilakukan tidak menimbulkan kecurigaan. Perusahaan perkebunan membangun kanal-kanal sebagai *drainase* untuk pengeringan lahan gambut, akibatnya terjadi penurunan muka air tanah pada kawasan lahan gambut yang akhirnya berdampak pada kekeringan yang tinggi dan menyebabkan lahan gambut mudah terbakar.

Penggundulan hutan dilakukan secara massif dan sistematis yang diikuti dengan pengeringan lahan gambut dengan cara membelah lahan gambut dan membangun kanal-kanal. Untuk menhemat biaya operasi dan untuk mengurangi derajat keasaman lahan gambut agar cocok ditanami tanaman komoditas industri,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dilihat dari dokumentasi kajian WALHI Riau “*Kelola Rakyat atas Ekosistem dan Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding*” Dokumentasi Kajian WALHI 2016, hlm. 21.

perusahaan melakukan pembersihan lahan dengan cara pembakaran.¹¹ Praktik inilah yang telah merusak hutan dan lahan gambut sehingga ekosistem kehilangan keseimbangannya.

Kebakaran hutan dan lahan yang luas di Provinsi Riau tersebut memberikan dampak tidak hanya terhadap lingkungan dan ekosistem, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Provinsi Riau. Banyak masyarakat yang terganggu aktivitasnya serta gangguan kesehatan yang menyerang saluran pernafasan. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau yang menyebabkan kabut asap, kesengajaan manusia merupakan faktor pendorong utamanya. Pembakaran yang dilakukan oleh korporasi perkebunan merupakan upaya untuk membersihkan lahan yang kemudian lahan tersebut digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Penerbitan izin atau perambahan kawasan hutan yang didominasi pengusaha-pengusaha perkebunan terjadi secara terus menerus dari penghujung tahun 1990-an hingga saat ini.¹² Pengkaplingan daratan Riau sudah dilakukan sejak tahun 1970-an melalui penerbitan Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada banyak perusahaan.¹³ Izin-izin yang diterbitkan berpengaruh pada penurunan hutan Sumatera terutama Riau secara drastis setiap tahunnya. Kedalaman gambut yang menjadi objek perlindungan diatur dalam regulasi yang menentukan bahwa ekosistem rawa gambut sebagai areal yang dilindungi sepenuhnya. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dalam ketentuan pasal 5 ayat (2)

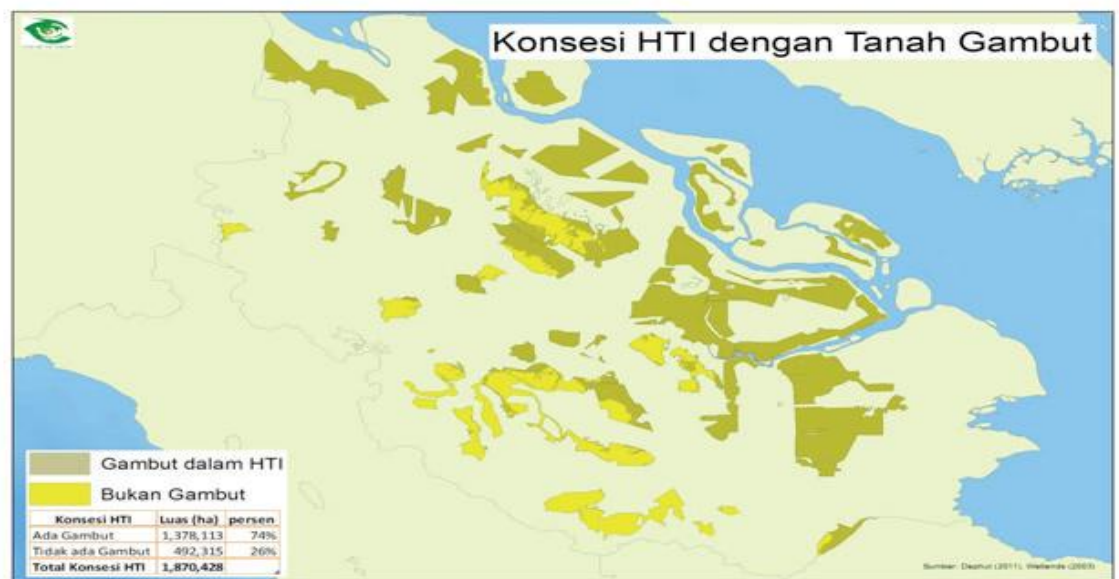
¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 254

¹³ *Ibid.*

menyebutkan Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.¹⁴ Berikut gambaran sebaran perizinan di atas lahan gambut di Riau:

Gambar 1.1
Sebaran Perizinan di atas lahan gambut di Riau

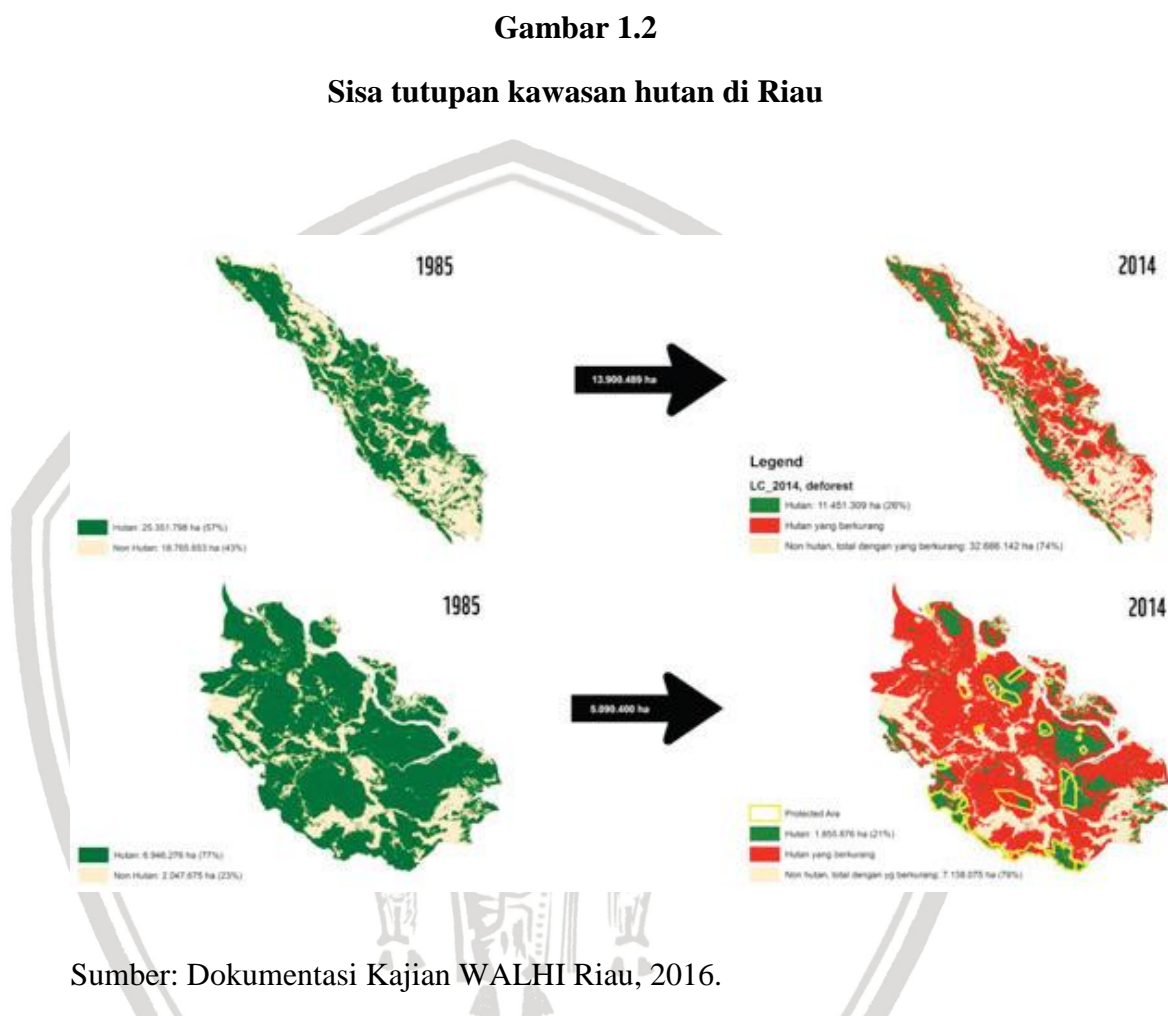


Sumber: Dokumentasi Kajian WALHI Riau, 2016.

Dari peta di atas diketahui bahwa lebih kurang 2.471.347 hektare lahan gambut Riau (1.378.113 hektare untuk HTI dan 1.093.234 hektare untuk lahan perkebunan) yang secara legalitas sudah dibebankan izin. Diketahui ada 52 perusahaan HTI yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung pada 2 group: APP dan APRIL. Dan 76 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dalam berbagai group paling besar seperti Wilmar, First Resource/ Surya Dumai Group, Asian Agri/RGE, Kuala Lumpur Kepong, Musim Mas, Salim Group, dan Provident Agro.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

Dalam perkembangannya, sisa tutupan hutan alam di Riau pada 2015 seluas 1855.876 Ha, saat ini tersisa kurang dari 1,5 juta Ha.¹⁵ Berikut adalah perubahan sisa tutupan kawasan hutan di Riau:



Perizinan yang menyebabkan kerusakan hutan Riau, tidak hanya melahirkan konflik dan krisis sumber daya alam, namun juga berperan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan asap. Di sisi lain, luas wilayah kelola rakyat semakin berkurang. Sebelum perusahaan perkebunan berdiri, sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan untuk mencari kayu-kayu dan berladang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sebagian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 255

masyarakat kehilangan mata pencaharian. Banyaknya perizinan perusahaan perkebunan di atas lahan gambut karena 50% daratan Riau merupakan ekosistem rawa gambut.¹⁶ Namun, bagi masyarakat Riau rawa gambut menjadi ekosistem yang sangat penting. Gambut menyediakan kebutuhan air dan kebutuhan pangan serta sumber kehidupan lainnya. Sedangkan bagi dunia, ekosistem gambut berperan penting dalam isu pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan ekosistem rawa gambut menyimpan karbon dalam lapisan tanah mineral dibawah gambut.¹⁷

Kurangnya perhatian negara kepada lingkungan maupun kepentingan rakyat kecil sangat disayangkan. Masyarakat terutama masyarakat Desa yang sebelumnya mengandalkan kehidupan dari alam baik melalui pertanian, mengumpulkan hasil hutan, mengambil kayu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil hutan, kini menjadi buruh-buruh perusahaan dengan pendapatan yang minim. Perizinan industri yang “rakus” terhadap lahan merupakan sumber kerusakan ekologis terutama bencana kabut asap di Provinsi Riau.

Hal inilah yang melatarbelakangi timbulnya gerakan sosial melawan kerusakan ekologis di Riau. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat sebagai bentuk reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak berpihak. Gerakan sosial biasanya mengambil bentuk seperti aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung pemerintahan. WALHI Riau merupakan salah satu LSM

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

¹⁷ Waykambas NP, “*Gambut dan Fungsinya Bagi Lingkungan*”. Diakses dari <http://waykambas.blogspot.co.id/2012/05/gambut-dan-fungsinya-bagi-lingkungan.html>, pada tanggal 19 April pukul 0:41 WIB.

atau organisasi non pemerintah yang ada di Riau yang terus berupaya mendesak pemerintah agar secepatnya menangani kasus kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap di Provinsi Riau. Sebelumnya, WALHI Riau telah berupaya mendesak pemerintah melakukan perubahan paradigma dan pendekatan dalam kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Perubahan yang dimaksud WALHI Riau adalah negara bukan hanya melakukan tanggap darurat atau *emergency response*, tetapi juga menuntut tanggung gugat perusahaan atas dampak kebakaran dan polusi asap.

Gerakan sosial yang dijalankan oleh WALHI Riau merupakan gerakan sosial baru karena gerakan sosial yang ditampilkan oleh WALHI Riau membawa isu yang berbeda dengan gerakan sosial lama. Yakni berupa gerakan lingkungan atau pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, gerakan yang dijalankan oleh WALHI Riau memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan gerakan sosial lama. Seperti tujuan dan ideologi, taktik, adanya struktur dan partisipan. Gerakan sosial baru muncul pada tahun 1960-an sebagai bentuk perkembangan dari gerakan sosial abad ke 19 yang diperkaya oleh gerakan buruh dan gerakan sosialis. Gerakan sosial baru juga berusaha merubah paradigma Marxis tentang konflik kelas yang selama ini Marxis hanya melihat bentuk perjuangan kelas. Gerakan sosial baru muncul sebagai kritik terhadap teori lama yang selalu ada dalam wacana ideologis kelas. Gerakan sosial baru adalah gerakan yang lebih bersifat plural dan memiliki orientasi isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi.

Gerakan sosial baru tampil dengan berbeda tak hanya berupa gerakan lingkungan, tetapi juga adanya gerakan perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), gerakan-gerakan perdamaian, dan lainnya. Gerakan tersebut berkembang seiring

dengan semakin luasnya ruang gerak politik. Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil, dan membidik domain sosial masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau negara, dan membangkitkan isu-isu sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Aksi kolektif yang dilakukan oleh WALHI Riau dalam melawan kerusakan ekologis dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena isu yang diangkat bukan isu yang beraliran Marxis atau yang biasa disebut gerakan sosial lama.

WALHI Riau menuntut pemerintah agar segera mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di tanah gambut Riau. Karena menurut mereka, masalah gambut yang mengakibatkan kerusakan ekologis serta bencana asap diakibatkan pemerintah yang membiarkan lahan tersebut dimonopoli oleh perusahaan perkebunan. Massa juga menuntut pemerintah untuk mencabut izin Hutan Tanaman Industri yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang ingin membuka lahan secara besar-besaran dengan cara membakar hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau yang menyebabkan bencana asap di Provinsi Riau. Hal tersebut menimbulkan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM untuk menuntut pemerintah Provinsi agar secepatnya mengatasi bencana asap yang sudah banyak menelan korban jiwa. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengambil tema mengenai gerakan sosial dalam menuntut pemerintah Provinsi Riau agar segera mengatasi permasalahan diatas. Peneliti mengambil judul penelitian **“GERAKAN SOSIAL MELAWAN KERUSAKAN**

EKOLOGIS (Studi Pada Gerakan Sosial WALHI Riau Tahun 2015 Dalam Kasus Kerusakan Ekologis Kebakaran Hutan dan Lahan)”

Alasan peneliti mengambil judul ini karena peneliti tertarik dengan Gerakan Melawan Kerusakan Ekologis yang dilakukan untuk memperjuangkan kelestarian alam dan lingkungan. Selain itu gerakan yang dilakukan juga mempengaruhi pemerintah untuk segera melakukan tindakan atau perubahan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui karakteristik dan hasil dari gerakan sosial yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam melawan kerusakan ekologis di Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah dan tidak menimbulkan penyimpangan dari pokok permasalahan. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan sosial baru dijalankan oleh WALHI Riau dalam melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Obyektif

1. Untuk memahami karakteristik yang digunakan oleh WALHI Riau dalam menjalankan gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk mengetahui hasil dari gerakan sosial baru yang dihasilkan oleh WALHI Riau dalam melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat gerakan sosial baru yang dijalankan oleh WALHI Riau berhasil dalam melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan.

1.3.2. Tujuan Subyektif

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang gerakan sosial melalui gerakan LSM atau masyarakat.

1.4 . Manfaat Penelitian

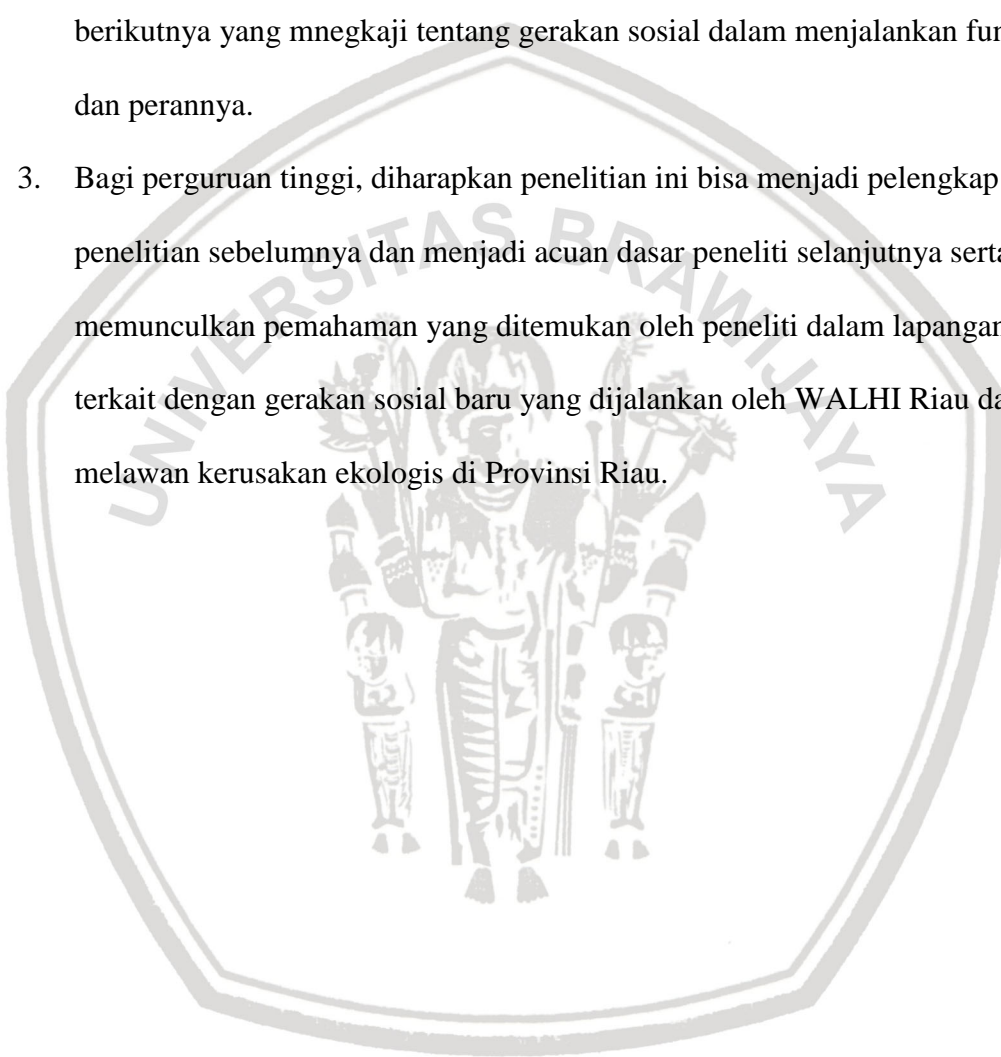
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi yang positif kepada banyak pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia pendidikan dan bisa menjadi contoh pada penelitian selanjutnya.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan gerakan sosial khususnya gerakan sosial baru yang dijalankan oleh WALHI Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan penelitian ini maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara nyata di lapangan dan juga penulis menerapkan teori yang pernah diajarkan selama perkuliahan.
2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi baru bagi peneliti berikutnya yang mnegkaji tentang gerakan sosial dalam menjalankan fungsi dan perannya.
3. Bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini bisa menjadi pelengkap penelitian sebelumnya dan menjadi acuan dasar peneliti selanjutnya serta memunculkan pemahaman yang ditemukan oleh peneliti dalam lapangan terkait dengan gerakan sosial baru yang dijalankan oleh WALHI Riau dalam melawan kerusakan ekologis di Provinsi Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, adanya kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu tema yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Kerangka konseptual diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Gerakan Sosial Baru

Dilihat dari jejak rekam sejarah, gerakan sosial bukanlah isu baru. Sejak zaman kolonialisme Belanda, gerakan sosial muncul dari gerakan petani dan gerakan nasionalisme yang terjadi pada awal abad ke-20. Sejak pasca kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa Orde Baru yang dalam segala keterbatasan ruang gerakanya kemudian berkembang gerakan feminisme, hak asasi manusia, gerakan pelestarian lingkungan dan demokrasi. Sementara hadirnya ragam gerakan tersebut terus berlanjut dan semakin menguat seiring dengan tersedianya ruang gerak politik yang lebih luas.

Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui

tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan.¹⁸ Definisi serupa juga dikemukakan oleh seorang teoritis terkemuka Sydney Tarrow yang mendefinisikan gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, baik itu dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit maupun penentang dan pemegang wewenang. Dilihat dari dua definisi tersebut, gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang memiliki sifat menentang untuk mencapai sebuah tujuan kolektif pula.¹⁹

Tindakan kolektif didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seseorang atau beberapa orang.²⁰ Sydney Tarrow berpendapat bahwa tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan. Tindakan kolektif bisa yang dimaksud berbentuk membosankan atau dramatis.²¹ Kebanyakan tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif sebagian besar memiliki nuansa pertentangan ketika aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang.

¹⁸ Suharko, "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reportar Gerakan Petani". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10 Nomor 1, Juli 2006 (1-34), hlm. 3

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Zomeren, "Journal Of Social Issues" Vol. 65 Nomor 4, 2009, hlm 646.

²¹ Suharko, "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reportar Gerakan Petani". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10 Nomor 1, Juli 2006 (1-34), hlm. 4

Locher membedakan gerakan sosial dari perilaku kolektif lainnya yaitu:²²

a. Aspek Pengorganisasian

Gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir sedangkan suatu perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Seperti misalnya para partisipan suatu kerusuhan mungkin saja diantara mereka melakukan kerjasama untuk jangka waktu yang singkat dalam suatu waktu tertentu, namun keterlibatan partisipan dalam peristiwa dalam peristiwa kerusuhan tersebut bersifat bebas, sementara, dan bukan merupakan kejadian yang secara hati-hati diorganisir.

b. Aspek Pertimbangan

Suatu gerakan sosial terjadi karena adanya pertimbangan. Sebagian besar peristiwa perilaku kolektif terjadi tanpa adanya perencanaan apapun dari mereka menyangkut waktunya. Sementara gerakan sosial secara intensif sengaja dimunculkan dan para partisipan secara hati-hati memutuskan apakah ikut atau tidak ikut terlibat dalam suatu gerakan. Gerakan sosial selalu mencari publisitas dan berusaha untuk menarik partisipan untuk mendukung gerakan. Pertimbangan perencanaan ini tidak terjadi pada sebagian besar bentuk dari perilaku kolektif.

c. Aspek Daya Tahan

Aksi gerakan sosial pada umumnya dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama atau memiliki daya tahan. Sementara perilaku kolektif hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya seperti suatu kerusuhan mungkin terjadi hanya beberapa jam atau beberapa hari dan hanya untuk beberapa bulan saja.

²² Suharko (2006), "*Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 Nomor 1

Berbeda dengan gerakan sosial yang dapat bertahan untuk beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade.

Gerakan sosial merupakan definisi yang luas, hal ini dikarenakan gerakan sosial memiliki banyak ragam atau bersifat variatif. Gerakan sosial bisa memiliki partisipan yang banyak dan sedikit. Tarrow menempatkan gerakan sosial dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan. Politik perlawanan yang dimaksud adalah bisa mencakup gerakan sosial, revolusi dan siklus pertentangan.

Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.²³ Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik sedang mengalami perubahan sehingga menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumber daya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan yang didukung oleh jaringan sosial yang sangat kuat dan di gabungkan oleh kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah pada interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan sehingga menghasilkan sebuah gerakan sosial.

Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengorganisir diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial.²⁴ Locher juga berpendapat tentang perilaku kolektif yang secara umum perilaku kolektif

²³ Suharko (2006), "*Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 Nomor 1, Juli, hlm 4.

²⁴ Oman Sukmana (2016), "*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*", Malang: Intrans Publishing, hlm. 4

diartikan sebagai setiap peristiwa di mana sekelompok orang terlibat dalam perilaku yang tidak biasanya seperti peristiwa yang tidak diharapkan atau peristiwa tidak biasa yang dilakukan saat keadaan normal dan tidak biasa dilakukan pada orang-orang normal pada umumnya.²⁵

Data sejarah menunjukkan adanya akumulasi yang terus bertambah tentang berbagai kisah perlawanan politik dan gerakan-gerakan pertentangan terhadap pemegang kekuasaan yang dianggap otoriter dan responsif di seluruh penjuru dunia ini.²⁶ Sepanjang abad ke-19 kisah gerakan sosial diperkaya dengan gerakan buruh dan gerakan sosialis yang pada gilirannya mengarah kepada pembentukan negara komunis, dan organisasi-organisasi dan partai-partai demokrasi sosial.²⁷ setelah terjadi Perang Dunia kedua, gerakan sosial tampil dengan ciri-ciri yang berbeda dari periode sebelumnya yang secara kentara ditandai oleh perubahan dan reformasi.

Istilah gerakan sosial baru dipergunakan secara luas untuk merujuk kepada fenomena gerakan sosial yang sudah muncul sejak pertengahan tahun 1960-an. Istilah tersebut terutama dipergunakan di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat yang telah memasuki era ekonomi pasca-industrial. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial baru bermula di negara-negara maju yang sebagai bagian dari konteks perkembangan peradaban mereka.

Pada dasarnya gerakan sosial baru muncul sebagai respon terhadap peralihan bentuk gerakan sosial kontemporer di negara-negara barat. Gerakan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶ Suharko (2006), "*Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 Nomor 1, Juli, hlm. 7

²⁷ *Ibid.*

sosial tradisional memiliki ciri yang mencolok yaitu tujuan ekonomis-materialis sebagaimana tercermin dari gerakan kaum buruh. Gerakan buruh pernah menjadi gerakan besar dan penting pada saat negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat memasuki era industrial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.²⁸ Gerakan buruh ini tersebut juga mendasari terbentuknya partai buruh dan partai komunis. Sedangkan gerakan sosial baru lebih berpusat pada tujuan seperti tujuan-tujuan non-material. Secara kontras, gerakan sosial baru berbeda dengan gerakan buruh yang berbasis konflik kelas. Yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial lama.

Menurut Pichardo, karakteristik gerakan sosial baru yang membedakan dengan gerakan sosial lama dapat dilihat dari empat aspek, yakni:²⁹

a. Tujuan dan Ideologi

Sifat ideologi dari gerakan sosial baru yang merupakan karakter refleksi diri. Hal ini berarti partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan. Gerakan sosial baru tidak lagi tertarik dengan isu-isu kenaikan upah buruh dalam industri seperti yang terjadi pada gerakan buruh pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gerakan sosial baru juga menepis semua asumsi Marxian yang menyatakan bahwa semua perjuangan dan pengelompokan didasari atas kelas. Gerakan sosial baru membangkitkan isu-isu pertahanan diri dari komunitas dan masyarakat untuk melawan ekspansi dari aparat negara yang semakin meningkat. Gerakan sosial melawan tata sosial dan kondisi yang didominasi oleh negara serta menyerukan sebuah kondisi yang lebih adil.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9

²⁹ Oman Sukmana, 2016, "*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*", Malang: Intrans Publishing, hlm. 119

b. Taktik

Gerakan sosial baru pada umumnya lebih memilih ke saluran politik normal, menerapkan taktik yang mengganggu dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik. Menurut Cohen, tujuan dari gerakan sosial baru adalah menata kembali hubungan negara, masyarakat dan perekonomian untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis tentang otonomi dan kebebasan individual, kolektivitas serta identitas dan orientasi mereka bisa didiskusikan.

c. Struktur

Gerakan sosial baru membangun struktur yang merefleksikan bentuk pemerintah yang bersifat representatif seperti yang mereka inginkan. Sikap anti institusi dari gerakan sosial baru juga berpengaruh terhadap cara mereka mengatur. Mereka cenderung melakukan rotasi kepemimpinan, suara umum dalam semua isu serta memiliki organisasi sementara yang bersifat tidak permanen. Mereka juga mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku untuk menghindari bahaya oligarki. Sehingga mereka cenderung menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap individu.

d. Partisipan

Partisipan gerakan sosial baru berasal dari berbagai kalangan sosial yang termasuk dalam kategori-kategori sosial seperti pendidikan, gender, okupasi dan kelas. Mereka tidak terkotakkan pada penggolongan tertentu seperti kaum proletar, petani, dan buruh, sebagaimana aktor-aktor gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi.³⁰ Terdapat dua pandangan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11

tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru.³¹ Pertama, dukungan dari kelas menengah baru yaitu sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Dukungan kelas menengah terhadap gerakan sosial baru lebih muncul dari mereka yang cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung pada pengeluaran negara seperti akademisi, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan. Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum dan isu-isu sosial. Basis partisipan dari gerakan sosial baru adalah ideologi.

Sejak awal, perspektif perilaku sosial telah memberikan kontribusi yang sangat baik, dengan menyatakan akar dari semua konflik, kekerasan, dan gerakan sosial adalah ketidakpuasan, baik terhadap norma-norma yang sedang berlaku, struktur sosial yang tidak adil sistem politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok dan identitas tertentu, dan yang keseluruhannya bisa pula dilihat dari kaca mata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda.³²

Gerakan sosial sebagian besar memiliki organisasi penggerak. Mereka juga memiliki pemimpin meskipun bersifat situasional maupun sementara dan tanpa melalui proses pembentukan struktur organisasi yang formal dan baku. Dalam setiap gerakan sosial senantiasa adanya identitas serta solidaritas, yang menjadi basis perlawanan yang dikuatkan oleh gerakan sosial itu sendiri.

³¹ *Ibid.*

³² Dimpos Manalu, "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik" Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12066>, pada tanggal 06 Oktober 2017 pukul 13:49.

Michael Lipsky menyatakan protes merupakan strategi politik bagi masyarakat yang diposisikan tidak adil untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui cara-cara yang konvensional.³³ Gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh WALHI Riau dalam menuntut pemerintah untuk segera mengatasi kerusakan ekologis di Provinsi Riau dilakukan dengan cara mengumpulkan aksi massa lalu menggelar orasi di depan gedung pemerintah. Gerakan sosial yang dilakukan tersebut tidak mengandung aksi kekerasan atau anarkis. Akan tetapi gerakan yang disertai dengan kekerasan sebagai strategi akan cenderung memperoleh kemenangan simbolis atau terbukanya akses dibanding perubahan aktual.

Jenkins mengemukakan 3 alasan untuk mengaitkan studi gerakan sosial dengan negara:³⁴

Pertama, gerakan sosial amat bersifat politis pada tuntutan perubahan sosial, menuntut perubahan keberadaan negara sendiri, ataupun perubahan menyangkut kelembagaan yang lebih sempit.

Kedua, negara menciptakan iklim politik tempat gerakan sosial berlangsung. Memberikan peluang atau hambatan pada keberlangsungan gerakan itu. Yakni berupa akses institusional maupun perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik.

Ketiga, karena gerakan sosial merupakan sebuah gugatan terhadap representasi politik. Gerakan sosial merupakan bentuk representasi langsung menyerupai konsep-konsep klasik demokrasi partisipatoris, alat untuk merepresentasikan yang

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

tidak terwakili dan menandingi oligarki atau elite yang hanya memperjuangkan nasibnya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa peranan gerakan sosial tidak saja dibutuhkan didalam sistem politik yang otoritarian, tetapi juga di dalam sistem politik demokrasi.

2.1.2. Kerusakan Ekologis

Kebakaran hutan dan lahan bagi warga di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Riau telah menjadi agenda bencana rutin setiap tahunnya. Kebakaran lahan membawa dampak tidak hanya terkait lingkungan tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi warga Provinsi Riau. Tidak tanggung-tanggung, dampak yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana asap berimbas pada banyaknya penerbangan yang dibatalkan dikarenakan jarak pandang yang minim, banyak warga lainnya yang terganggu aktivitasnya akibat gangguan kesehatan yang menyerang pernafasan atau ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut).

Perilaku manusia terhadap alam dan eksploitasi besar-besaran terhadap alam telah mendorong dunia untuk menuju kerusakan ekologis yang berkepanjangan sekaligus dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Briyant dan Bailey melihat krisis ekologi dalam tiga asumsi.³⁵ Pertama, kerugian dan manfaat terkait dengan perubahan lingkungan hidup tidak terbagi secara adil. Perubahan pada lingkungan hidup menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat tidak sama dimana terjadi ketimpangan politik, sosial dan ekonomi yang menimbulkan kerugian. Kedua, ketidakadilan hubungan kuasa mampu

³⁵ David Ardhian (2016)., “*Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)*” Institut Pertanian Bogor.

memperkuat atau mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung. Dimana perubahan lingkungan mampu mempengaruhi kondisi status quo didalam ekonomi dan politik yang ada. Ketiga, ketidakseimbangan dari kerugian dan manfaat serta menguat atau menurunnya ketidakseimbangan yang sedang berlangsung memiliki dampak politik dalam mengubah hubungan kuasa yang ada.

2.1.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Fenomena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke 20. Yang diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Kemudian disusul dengan organisasi lain yang bersifat lokal maupun nasional. LSM yang dikenal sekarang ini, terutama untuk Indonesia, pengertiannya mengacu pada satu bentuk organisasi *volunteer* di luar struktur negara yang memiliki bentuk pengorganisasian yang jelas, organisasinya relatif kecil, tidak berupa organisasi massa dan memiliki sistem manajerial yang resmi.³⁶ Dalam pengertian yang lebih politis, LSM merupakan organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai pesaing pemerintah.

Kelahiran LSM di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang berdiri dengan sendirinya. Mereka merupakan kelanjutan dari fenomena yang berkembang di dunia internasional khususnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang pada awal abad ke 20-an telah mencapai perkembangan yang sedemikian rupa. kelahiran LSM-LSM di Indonesia sangat tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan lembaga donor internasional dan LSM-LSM internasional,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 70

dimana sejak dekade 1950-an mulai bermaksud mengembangkan kegiatan-kegiatannya di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia³⁷

Lewis mengungkap ada beberapa batasan untuk melihat organisasi LSM.³⁸ *Pertama*, LSM dilihat dari jenis-jenis aktivitas yang dilakukan organisasi yang bekerja untuk layanan dasar kebutuhan hidup dan LSM yang bekerja untuk advokasi kebijakan serta kampanye dalam rangka transformasi sosial. *Kedua*, LSM juga dilihat dari peran dan fungsinya yang bisa dibedakan menjadi implemementator, katalisator, dan kemitraan. Fungsi dari implemementator yaitu organisasi-organisasi melakukan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa agar disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. LSM ini juga berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan di lapangan. Misalnya seperti bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Fungsi katalisator terlihat dari organisasi yang tidak langsung menyalurkan bantuan, tetapi melakukan kegiatan untuk memfasilitasi tumbuhnya pemikiran dan aksi-aksi untuk melakukan transformasi sosial. Orientasinya pada peningkatan inovasi dan menghasilkan alternatif pemikiran dan praktek dalam rangka mendorong perubahan perilaku maupun perubahan kebijakan. Fungsi kemitraan yaitu merujuk pada perkembangan LSM yang mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain seperti sektor swasta dan pemerintah. Orientasi dari fungsi ini adalah kolaborasi yang dapat saling memberi manfaat antara LSM dan pihak lain dalam kerjasama.

³⁷ Muhammad Budairi (2002), "*Masyarakat Sipil dan Demokrasi*", E-Law Indoensia, Yogyakarta, hlm. 71

³⁸ *Ibid.*, hlm. 74

Billah menyatakan bahwa istilah LSM di Indonesia memiliki pemaknaan yang berbeda dari konteks penggunaan NGO dalam literatur berbahasa Inggris.³⁹ Pada tahun 1970-an digunakan istilah Organisasi Non Pemerintah atau ORNOP. Konteks politik pada masa Orde Baru membuat kalangan aktivis berpikir ulang untuk menggunakan istilah ORNOP karena dikhawatirkan akan menimbulkan pengekangan atau penindasan terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu. Istilah ORNOP dipandang pemerintah sebagai organisasi yang melawan pemerintah. Oleh karena itu digunakan istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Karena memiliki makna sebagai organisasi yang mandiri.

Clarke mendefinisikan peran LSM dalam ranah politik di negara berkembang yaitu LSM merupakan organisasi privat, nirlaba dan profesional dengan kejelasan badan hukum yang menaruh perhatian pada tujuan-tujuan kesejahteraan publik.⁴⁰ Dari definisi tersebut, LSM merupakan organisasi privat untuk membedakan dengan organisasi publik, tidak mengambil keuntungan atau nirlaba, memiliki badan hukum sebagai landasan yang legal dalam melakukan kinerjanya.

Diani dan Porta menjelaskan bahwa organisasi merupakan sumber eksternal untuk bertentangan dengan lawan politik.⁴¹ Bagaimanapun kompleksitas dan keragaman dari elemen gerakan sosial maupun persepsi publik selalu mengacu pada simbol tertentu baik individu maupun organisasi. Misalnya dalam konteks gerakan lingkungan hidup global maka persepsi publik akan mengacu pada

³⁹ *Ibid.*, hlm. 76

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Oman Sukmana, 2016, "*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*", Malang: Intrans Publishing, hlm. 73

organisasi seperti Greenpeace atau WWF. Dalam konteks gerakan sosial, Diani dan Porta menggolongkan gerakan sosial menjadi dua, yaitu organisasi gerakan sosial profesional dan organisasi gerakan sosial partisipatif. Organisasi gerakan sosial profesional lebih dekat pada ciri-ciri LSM lingkungan hidup yang dikenal seperti Greenpeace, WWF, WALHI dan lain sebagainya. Hal tersebut dicirikan dengan adanya kepemimpinan secara penuh waktu dimana sebagian besar sumberdaya diperoleh dari kelompok yang mereka dampingi. Organisasi gerakan sosial profesional menganut pada sistem manajemen dan struktur organisasi serta memiliki kemampuan teknis dan keterampilan tertentu sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Sedangkan organisasi gerakan sosial partisipatif seperti organisasi protes massa.

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini tentunya diperlukan adanya rujukan untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian lain. Terdapat 2 penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam mengarahkan penelitian ini menjadi lebih berbeda dan lebih spesifik lagi dalam mencari titik persoalan. Berikut penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Penelitian I	Penelitian II
Judul Penelitian	Dinamika Peran dan Strategi LSM Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan).	Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Pola Jaringan Gerakan Sosial Cinta Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta.
Nama Peneliti	David Ardhian	Aghniya Halim
Tahun Penelitian	2016	2016
Metode	Kualitatif	Kualitatif
Fokus Penelitian	Meneliti peran dan strategi LSM dalam menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan dan kontribusinya terhadap penguatan kebijakan dan tata kelola	Untuk mengetahui pola jaringan gerakan sosial yang dilakukan oleh WALHI Yogyakarta.

	pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	
Hasil Penelitian	<p>LSM mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong kesetaraan relasi kuasa antar pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat. LSM memperkuat pemerintah untuk menghasilkan regulasi tentang kebakaran hutan dan lahan dan mendorong proses penegakan hukum. LSM mempengaruhi perilaku perusahaan dengan menggunakan standar keberlanjutan lingkungan hidup agar perusahaan tidak melakukan praktik pembakaran dalam operasinya. Selain itu,</p>	<p>WALHI Yogyakarta memiliki tiga pola jaringan utama. Yang pertama pola jaringan internal yang terdiri dari anggota, Shia-Link, dan Warga Berdaya, pola internal ini memastikan ada hubungan dua arah dari anggota langsung ke masyarakat, dan dari masyarakat langsung ke WALHI Yogyakarta melalui Warga Berdaya agar terjadi hubungan. Pola kedua adalah pola By Case, pada pola jaringan ini setiap unsur seperti anggota dan Warga Berdaya berperan sebagai penjaring laporan</p>

	LSM mempromosikan praktik-praktik terbaik masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat lokal.	sehingga setiap jenis kasus dapat langsung terdeteksi oleh WALHI Yogyakarta. Pola ketiga adalah berdasarkan pada Empat Isu Strategis, isu ini digodok pada saat PDLH (Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup) setiap 4 tahun sekali untuk melihat perkembangan kondisi lingkungan dan menentukan isu-isu apa saja yang dianggap masih relevan.
--	---	---

Sumber: Diolah peneliti, 2017

Pada penelitian I, yang berjudul Dinamika Peran dan Strategi LSM Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan), yang dilakukan oleh David Ardhian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi LSM dalam menanggapi isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta implikasinya terhadap perubahan kebijakan dan tata kelola. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan ruang lingkup analisis pada tingkat nasional dan lokal. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah Gerakan Sosial Baru yang dibingkai

dengan kerangka ekologi politik. Untuk menganalisis bentuk-bentuk aksi LSM pada tataran empiris, studi ini menggunakan konsep keluhan kolektif, struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses *framing*. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah meneliti peran dan startegi LSM dalam menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan dan kontribusinya terhadap pengutan kebijakan dan tata kelola pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil dari penelitian ini adalah LSM mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong kesetaraan relasi kuasa antar pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat. LSM memperkuat pemerintah untuk menghasilkan regulasi tentang kebakaran hutan dan lahan dan mendorong proses penegakan hukum. LSM mempengaruhi perilaku perusahaan dengan menggunakan standar keberlanjutan lingkungan hidup agar perusahaan tidak melakukan praktik pembakaran dalam operasinya. Selain itu, LSM mempromosikan praktik-praktik terbaik masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat lokal.

Pada penelitian terdahulu II, yang berjudul Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Pola Jaringan Gerakan Sosial Cinta Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta, yang dilakukan oleh Aghniya Halim, peneliti menggunakan teori jaringan yang dikemukakan oleh Barry Wellman dan Roland Burt. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis studi kasus intrinsik. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informn menggunakan purposive. Untuk menjamin validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Fokus penelitian ini adalah Meneliti peran dan

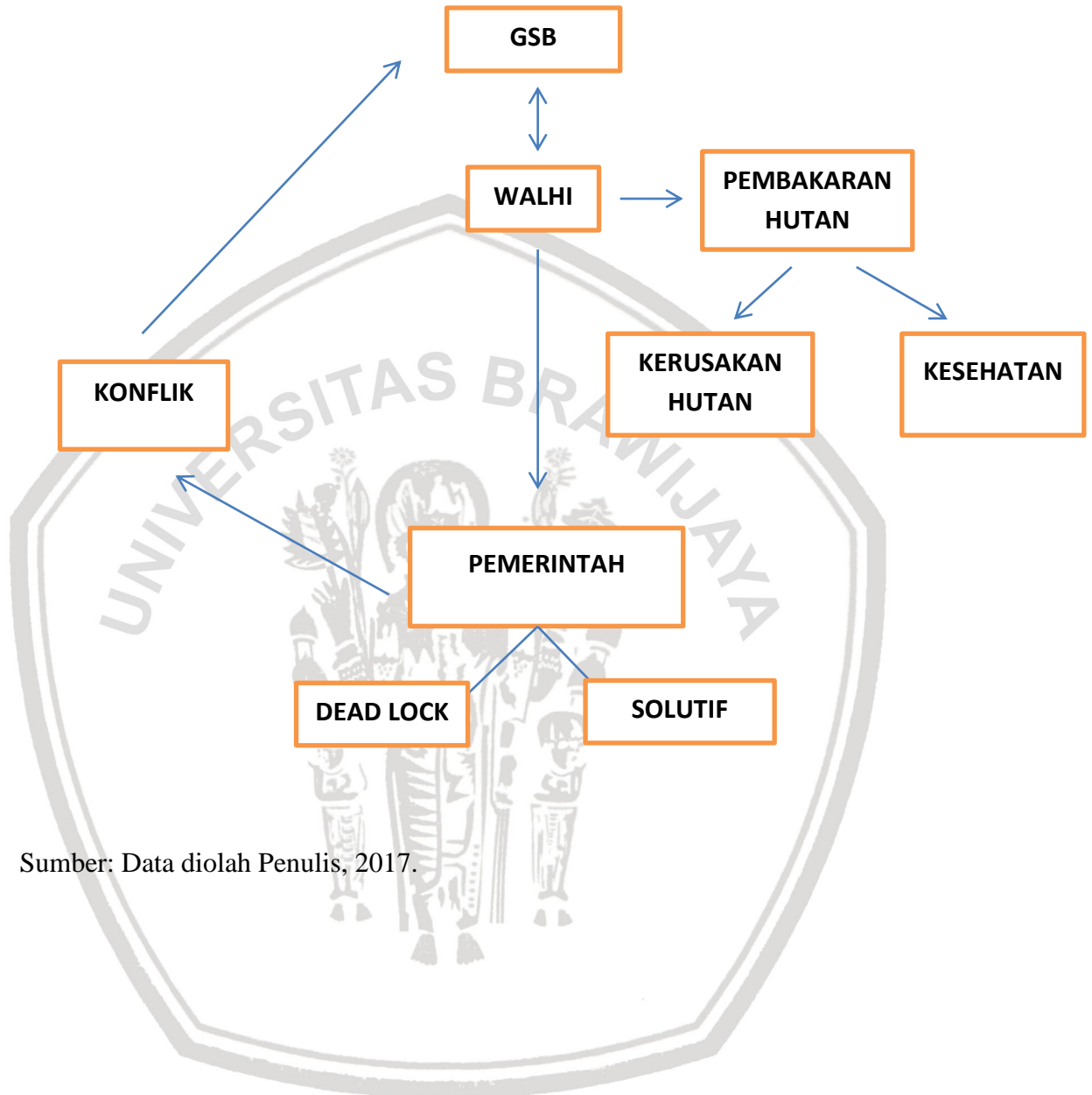
strategi LSM dalam menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan dan kontribusinya terhadap penguatan kebijakan dan tata kelola pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Wahana lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta memiliki 3 pola jaringan utama, pertama pola jaringan internal yang terdiri dari anggota, Shia-Link dan Warga Berdaya. Pola internal ini memastikan ada hubungan dua arah dari anggota langsung ke msyarakat, dan dari masyarakat langsung ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta melalui Warga Berdaya agar terjadi hubungan. Pola kedua adalah pola By Case, pada pola jaringan ini setiap unsur seperti anggota dan Warga Berdaya berperan sebagai penjaring laporan sehingga setiap jenis kasus dapat langsung terdeteksi oleh WALHI Yogyakarta. Pola ketiga adalah berdasarkan pada Empat Isu Strategis, isu ini digodok pada saat PDLH (Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup) setiap 4 tahun sekali untuk melihat perkembangan kondisi lingkungan dan menentukan isu-isu apa saja yang dianggap masih relevan.

Sedangkan dalam penelitian ini, perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis akan meneliti tentang gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dengan fokus penelitian Gerakan Sosial Baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam melawan kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan. Disini, penulis akan meneliti kaharakteristik dari gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yang membedakan dengan gerakan sosial lama, seperti tujuan, taktik, partisipan, dan struktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan positivis kualitatif.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang penulis gunakan merupakan satu kesatuan alur yang mampu menjelaskan hubungan teori dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teori gerakan sosial baru yang menjadi acuan dalam analisis gerakan sosial yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam rangka meyakinkan kelompok sasaran (Pemerintah) untuk segera melakukan tindakan dalam mengatasi kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Gerakan sosial melawan kerusakan ekologis yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dilatarbelakangi dari kerusakan ekologis yang terjadi di Provinsi Riau akibat kebakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana asap yang berdampak pada masalah kesehatan. Masyarakat menilai pemerintah lamban dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yang mewakili masyarakat melakukan gerakan sosial untuk menyerukan aspirasi mereka terhadap pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Dalam gerakan sosial yang ditujukan kepada pemerintah tersebut, terdapat dua kemungkinan diantaranya jika pemerintah merespon dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana asap tidak akan terjadi lagi. Namun, jika pemerintah tidak memberikan respon dan solusi, maka kebakaran hutan akan terus terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam bagan berikut:

Bagan 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah Penulis, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam bab tiga ini penulis membahas tentang pendekatan positivisme. Pendapat bagi kaum positivis, ilmu alam dan ilmu sosial sebagian besar dapat disamakan.⁴² Menurut kaum positivis, kita dapat menentukan hubungan yang teratur antarfenomena sosial, menggunakan teori untuk bisa menghasilkan hipotesis yang bisa diuji secara langsung dengan observasi lapangan.⁴³ Positivisme berpendapat bahwa tidak ada dikotomi tampilan atau realitas dan bahwa dunia adalah yang sebenarnya dan tidak dikonstruksikan secara sosial.⁴⁴ Oleh karena itu, observasi secara langsung dapat berfungsi sebagai suatu uji independen terhadap validitas suatu teori. Yang sangat penting, seorang peneliti dapat menjadi objektif berdasarkan cara mereka menjalankan observasi tersebut. Bagi kaum positivis, tujuan ilmu sosial adalah untuk membuat pernyataan sebab-akibat. Dalam pandangan mereka adalah memungkinkan untuk bisa menetapkan hubungan sebab-akibat antarfenomena sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer untuk mendapatkan sejumlah data penelitian. Yakni dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, wawancara individu intensif, dan wawancara

⁴² David Marsh & Gerry Stoker, (2012). “ *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*”. Nusa Media: Bandung, hlm 26.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27

kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks. karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tantang gerakan sosial baru yang dijalankan oleh WALHI Riau dalam melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selain itu penulis juga menjelaskan tindakan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan sumber pokok dari masalah penelitian. Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Untuk menemukan jawabannya diperlukan pengumpulan data pada latar penelitian atau di lapangan penelitian. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang menimbulkan persoalan. Adapun fokus penelitian ini adalah Gerakan Sosial Baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam gerakan melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

3.3 Lokasi dan Subyek Penelitian

Demi mendukung diperolehnya data yang sesuai dalam mencapai hasil penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yang bertempat di Jalan Cempedak 1 dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Hal ini berkaitan dengan peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Riau sebagai organisasi non pemerintah yang berupaya mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menanggulangi kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Subyek penelitian ini adalah Gerakan Sosial Baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dengan membentuk Gerakan Melawan Asap sebagai bentuk upaya untuk mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan ekologis tersebut yang diharapkan dapat memberikan gambaran riil bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sendiri juga menjadi tempat penelitian yang akan peneliti lakukan untuk memperoleh data pendukung terkait penelitian ini.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik *Purposive* dimana peneliti tidak menggunakan informan secara acak melainkan sudah menentukannya terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak ada kriteria baku mengenai jumlah responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. Yang artinya dengan menggunakan teknik ini, peneliti memilih narasumber yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan penulis teliti. Penentuan informan dalam penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan informasi dan data yang maksimal. Oleh sebab itu orang yang menjadi informan harus mempunyai kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau memahami gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.
2. Direktur Eksekutif beserta staf yang terlibat dalam gerakan sosial yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat tiga informan yakni informan kunci, informan pendukung dan informan tambahan. Diantaranya yaitu:

1. Informan Kunci

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Bpk. Tony yaitu salah satu staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.

2. Informan Pendukung

Dalam penelitian ini, informan pendukung adalah Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki beberapa data terkait kebakaran hutan dan lahan.

2. Informan Tambahan

Informan tambahan didapat dari Bpk. Edward yang merupakan seorang seniman di Rumah Budaya Sikukeluang sebagai organisasi yang melestarikan kesenian daerah Riau yang juga ikut berkoalisi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam melakukan gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang akan menjadi informan terkait faktor keberhasilan gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.

Informan tambahan juga didapat dari Bapak Bruno selaku aktivis dari komunitas gerakan masyarakat Pungkat di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Gerakan tersebut merupakan gerakan masyarakat dalam menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendirikan perusahaan perkebunannya di Desa Pungkat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat riset kualitatif. Seale (1998) mengatakan, bahwa kebnagkitan dalam penggunaan metode wawancara kualitatif berasal dari kritik penganut *interpretivis* terhadap “pendekatan wawancara klasik”.⁴⁵ Wawancara kualitatif tak hanya merupakan alternatif bagi kuesioner, manfaat lainnya adalah wawancara ini akan memfasilitasi kemampuan kita untuk mendapat informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dn kepribadian yang relevan.⁴⁶ Penulis menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.⁴⁷ Steward mengatakan secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak

⁴⁵ Lisa Harrison (2016), “*Metodologi Penelitian Politik*”. Jakarta: Kencana, hlm. 103

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 104

⁴⁷ *Ibid.*

literatur yang membahasnya.⁴⁸ Informan yang terkait dalam penelitian ini adalah Direktur Eksekutif WALHI Riau dan Bpk Heri.

Tabel 3.1

Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

Pedoman Wawancara (Informan Kunci: Direktur Eksekutif WALHI Riau)

1. Kapan anda pertama kali bergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau?
2. Apa yang membuat anda tertarik untuk bergabung dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau?
3. Kapan anda pertama kali mengikuti kegiatan aksi bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau?
4. Bagaimana gerakan ini bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat?
5. Bagaimana anda mempertahankan solidaritas dalam gerakan melawan kerusakan ekologis ini?
6. Apakah gerakan tersebut memiliki struktur organisasi?
7. Apa yang menjadi masalah sehingga memicu terjadinya gerakan ini?
8. Bagaimana taktik yang digunakan dalam gerakan ini?

⁴⁸ *Ibid.*

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara kepada Informan Tambahan

**Pedoman Wawancara (Informan Tambahan: Ketua Rumah Adat
Sikukeluang)**

1. Apa yang mendasari gerakan ini?
2. Bagaimana pola komunikasi dan mengumpulkan orang atau massa?
3. Siapa yang menginisiasi gerakan ini?
4. Apa yang dihasilkan dari gerakan ini?
5. Berapa lama gerakan ini?
6. Apa faktor yang membuat gerakan ini berhasil?

b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, dimana dokumen tersebut adalah segala catatan baik berbentuk kertas (*hard copy*), maupun elektronik (*soft copy*), dan dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, laporan kegiatan dan lainnya.⁴⁹ Pengumpulan data dengan dokumentasi juga akan dilakukan dengan melihat surat, berkas-berkas administratif ataupun artikel-artikel terkait yang dapat mendukung penelitian dengan bertambahnya sumber informasi. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjelaskan gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam melawan kerusakan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan dan

⁴⁹ Samiaji Sarosa (2012), “*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*”, Jakarta: PT Indeks, Hlm. 61

perkembangan atau upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Riau terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

3.6. Analisis Data

Analisis data yang dikumpulkan oleh orang atau organisasi lain disebut analisis sekunder, sedangkan analisis primer adalah menganalisis data yang dikumpulkan sendiri.⁵⁰ Oleh karena itu analisis primer dilakukan dengan mengumpulkan data sendiri. Setiap data yang didapat oleh penulis baik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan responden lainnya akan dianalisis secara lebih mendalam. Analisa data akan dilakukan dengan cara berikut:

1. Reduksi Data

Sebagai proses pemilahan data, penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singka, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan.

⁵⁰ Lisa Harrison (2016), "*Metodologi Penelitian Politik*". Jakarta: Kencana, hlm. 124

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menemukan keabsahan data adalah dengan menggunakan Triangulasi. Tujuannya adalah menjawab aspek-aspek pertanyaan riset yang tidak bisa dicakup oleh penggunaan salah satu saja dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif, atau menambah kesahihan hasil yang dihasilkan oleh satu pendekatan.⁵¹ Dengan menggunakan prosedur ini, penulis ingin mendapatkan bukti-bukti yang kuat dengan melihat indeks-indeks internal lain yang dapat memberikan bukti yang kuat. Penulis akan mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Semua *indeks* yang penulis gunakan akan bersifat membuktikan, sedangkan beberapa diantaranya merupakan indikator yang bersifat membedakan dan menyimpulkan. Triangulasi ini akan menarik kembali rangkaian kasual yang paling masuk akal dari rancangan program yang sementara, untuk memperoleh hasil akhir dengan lebih dari satu ukuran dan satu sumber untuk setiap kaitan dalam rangkaian.

⁵¹ David Marsh & Gerry Stoker (2012). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, Hlm. 289

BAB IV

WALHI RIAU DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

4.1 Gambaran Umum Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu masalah di Provinsi Riau adalah mengenai kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 1997 hingga tahun 2015, masalah ini senantiasa terjadi setiap tahunnya terutama memasuki musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan selain karena pengaruh dari iklim, kebakaran juga disebabkan oleh perbuatan manusia dan perusahaan perkebunan baik secara sengaja maupun tidak sengaja serta karena kelalaiannya.

4.1.1 Kesengajaan Pembakaran Hutan Oleh Perusahaan Tertentu

Penerbitan izin sektor kehutanan, maupun perkebunan diatas rawa gambut merupakan suatu hal yang sebenarnya secara regulasi dapat dimungkinkan dengan merujuk pada kriteria kedalaman tertentu. Peluang pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut melalui skema perizinan sebenarnya bertentangan secara aspek ekologis. Diketahui bahwa ekosistem rawa gambut memiliki perbedaan karena gambut merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi, ketika ada kerusakan pada satu titik tertentu akan berdampak pada kawasan lain yang berada dalam hamparannya.

“lahan gambut di Riau ini memiliki regulasi dan itu sudah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Karena tanah gambut memiliki kadar air yang sangat tinggi sehingga jika lahan itu terbakar atau beralih fungsi, maka ekosistem disekitarnya juga ikut rusak”⁵²

⁵² Wawancara dengan Pak Tony selaku Direktur Eksekutif WALHI Riau pada 7 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

Oleh karena itu tanah gambut tidak disarankan untuk dimanfaatkan dalam skema budidaya monokultur dan bukan tanaman aslinya. Namun, tanah gambut yang berada di Provinsi Riau sering dibiarkan untuk dieksploitasi berlebihan, khususnya untuk pemenuhan bahan baku kertas dan kelapa sawit.

Perizinan yang diterbitkan berpengaruh pada penurunan secara drastis terhadap hutan di Riau setiap tahunnya. Hal tersebut membuat pembukaan lahan dengan cara pembakaran semakin meluas untuk usaha pertanian dan perkebunan. Penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang sengaja membuka lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan ataupun kehutanan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap. Hingga pada puncaknya kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang terjadi pada Juni hingga Oktober tahun 2015 telah meneror penduduk di Sumatera terutama di Provinsi Riau. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 hingga menyebabkan bencana asap di Provinsi Riau sangat pantas untuk mendapatkan perhatian karena kompleksitas persoalan yang terjalin di dalamnya dan juga dampaknya yang besar.

Ada beberapa kemungkinan pemerintah daerah terlihat tidak peduli terhadap hal tersebut. Salah satu yang penting untuk dicatat adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap pada tahun 2015 terjadi bersamaan dengan proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).⁵³ Pilkada tidak secara langsung menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetapi hubungan tersebut bisa saja ditelisik dari fakta banyaknya perizinan kepada perusahaan

⁵³ *Ibid.*

perkebunan yang diterbitkan kepala daerah menjelang Pilkada. Perizinan tersebut diberikan oleh kepala daerah kepada pihak-pihak yang bergerak di industri berbasis hutan dan lahan, seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Perizinan industri inilah yang kemudian dalam praktiknya diduga melakukan proses pembersihan lahan atau *land clearing* dengan cara membakar di wilayah konsesi mereka.

Membakar lahan dianggap sebagai metode paling cepat dan murah untuk membersihkan lahan, dibanding pembersihan lahan menggunakan mesin dan bahan kimia. Pemerintah mengakui bahwa cara pembersihan lahan dengan cara pembakaran merupakan metode berbahaya, sehingga tahun 1995 praktik seperti itu dilarang.⁵⁴ Namun, larangan seperti itu tidak banyak berpengaruh. Masih banyak perusahaan yang terus membakar untuk membersihkan lahan.

Gambar 4.1

Pembersihan hutan dan lahan dengan cara dibakar



Sumber: Dokumentasi penulis, 2017.

⁵⁴ *Ibid.*

Gambar 4.2**Pembersihan hutan dan lahan dengan cara penebasan**

Sumber: Dokumentasi penulis, 2017

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR), harga lahan yang sudah dibersihkan dengan cara tebas dan tebang, ditawarkan dengan harga Rp 8,6 juta per hektar. Namun, lahan dalam kondisi siap tanam atau sudah dibakar akan meningkat menjadi Rp 11,2 juta per hektar. Tiga tahun kemudian setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp 40 juta per hektar. Kenaikan nilai ekonomi dari lahan itulah yang membuat aktor-aktor atau pebisnis yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terus menerus terjadi setiap tahun. Selain itu pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Distribusi keuntungan mengalir pada mereka yang ikut menebas dan menebang hutan dan lahan, diantaranya oknum aparat Desa dan Kecamatan, tim

pemasar lahan. Namun mereka hanyalah pihak yang mendapatkan keuntungan paling kecil. Keuntungan ekonomi terbesar atau 85% dari arus kas yang mengalir justru ke tangan perusahaan/pengembang perkebunan dan para elit lokal, seperti kepala daerah, oknum pejabat pemerintah dan pengurus kelompok tani.⁵⁵ Dalam hal jual beli lahan, para pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi terutama adalah para elit lokal dan perusahaan, yang bekerja dengan terorganisasi. Ada pihak-pihak yang menjalankan tugas berbeda seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan, penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.

4.1.2 Gambaran Konflik Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan

Desa Pungkat merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang menjadi lokasi usaha perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan swasta. Desa yang berada di daerah rawa gambut ini dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal. Hal ini terlihat dari susahny akses air bersih, tidak tersedianya energi listrik yang memadai dan kondisi kehidupan warga yang cukup sederhana. Kebutuhan air dan kebutuhan sehari-hari lainnya warga ditopang oleh hutan rawa gambut yang kondisinya masih cukup lestari. Ekosistem hutan rawa gambut ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat Desa Pungkat dan desa-desa sekitarnya.

Hutan menyediakan cadangan air bersih bagi masyarakat Desa Pungkat ketika musim kemarau tiba. Air yang tersedia di hutan rawa gambut Desa

⁵⁵ *Ibid.*

Pungkat disebutkan salah seorang aktivis komunitas Desa Pungkat yang bernama Bruno.

“Desa ini punya air rawa dengan kualitas dan kejernihan yang lebih baik dibandingkan sumber air di wilayah lain yang ada di Kecamatan Gaung”⁵⁶

Keberadaan hutan rawa gambut juga menopang nafkah hidup sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin kapal tradisional. Penggunaan kayu alam oleh pengrajin kapal dilakukan dengan selektif dengan cara tebang pilih.

Penerbitan Izin lokasi pada tahun 2012 dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2013 kepada perusahaan perkebunan swasta oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di atas hamparan kawasan hutan rawa gambut dan ruang kelola rakyat ditanggapi dengan reaksi penolakan oleh masyarakat.⁵⁷ Penolakan tersebut tidak menghalangi perusahaan perkebunan swasta tersebut untuk terus beraktivitas di Desa Pungkat. Pada sekitar bulan Maret 2014, perusahaan perkebunan tersebut telah melakukan aktivitas pembangunan kanal dan penebangan.⁵⁸ Aktivitas ini sebenarnya bertentangan dengan hukum, karena IUP yang dimiliki perusahaan tersebut belum dilengkapi HGU dari BPN, dan kawasan yang dieksplorasi merupakan kawasan hutan yang belum dilakukan pelepasan atau perubahan status.⁵⁹ Selanjutnya, masyarakat Desa Pungkat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indragiri Hilir,

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Bruno selaku ketua komunitas Desa Pungkat pada 3 September 2018 pukul 14.00 WIB.

⁵⁷ Catatan WALHI Riau Tahun 2016 “Keadilan Ekologis Penguasaan dan Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Desa Pungkat”

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

yang mana akhirnya Pemerintah Daerah setempat mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas perusahaan perkebunan tersebut di Desa Pungkat. Penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD ini sama sekali tidak digubris oleh perusahaan tersebut, aktivitas pembangunan kanal dan penebangan kayu di kawasan hutan tetap dilakukan. Kondisi semakin memanas karena perusahaan perkebunan melakukan proses tapal batas dan menandai areal perkebunan kelapa warga sebagai batas wilayah perkebunannya. Beberapa warga lainnya menyebutkan bahwa akibat aktivitas perusahaan perkebunan yang tidak merespon penolakan warga dan mematuhi rekomendasi Pemerintah Daerah mengakibatkan kemarahan warga. Pembakaran 7 alat berat dan 2 pondok kecil perusahaan akhirnya tidak dapat dihindari.

“kami sudah melakukan penolakan ke perusahaan, tapi nggak digubris, akhirnya kami geram karna lama-lama hutan kami dihabisi oleh mereka (perusahaan) akhirnya kami ramai-ramai datang kesana (hutan) terus kami bakarlah alat berat mereka”⁶⁰

Akibat dari kejadian pembakaran ini, 21 orang warga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Indragiri Hilir. Pada prinsipnya, proses hukum yang dilakukan terhadap warga Desa Pungkat merupakan suatu hal yang wajar, namun proses penangkapan yang dilakukan aparat terbilang berlebihan dengan melibatkan hampir 300 orang aparat kepolisian. Selain itu, tindakan penangkapan, penahanan dan pengggeladahan yang dilakukan oleh kepolisian sangat disesalkan karena proses tersebut tidak disertai surat perintah dan menggunakan cara-cara kekerasan.

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Bruno selaku ketua komunitas Desa Pungkat pada 3 September 2017 pukul 14.30 WIB.

“Kejadian itu mengakibatkan 2 orang warga Pungkat mengalami gangguan mental atau psikologis, dan menimbulkan keadaan trauma bagi masyarakat luas, kerusakan beberapa rumah warga dan terhentinya aktivitas sekolah”⁶¹

Tindakan yang berlebih-lebihan dan tidak sesuai prosedur ini membuat perusahaan tersebut berada di atas angin dan membuat korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini pada 9 Oktober 2014 memasukkan alat beratnya dan melakukan aktivitas penebangan di hutan rawa gambut Desa Pungkat.

4.1.3 Penerbitan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3)

Pada tanggal 19 Juli 2016, berdasarkan hasil investigasi Jikalahari mengeluarkan rilis Polda Riau yang menghentikan penyidikan terhadap 11 korporasi yang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Namun, dua hari kemudian Polda Riau menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa bukan 11 perusahaan yang telah di SP3, melainkan 15 perusahaan.⁶² SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya, karena alasan tertentu.

SP3 15 korporasi sendiri telah diterbitkan sejak Januari hingga Juni 2016. Alasan penghentian penyidikan pun bervariasi dari soal kebakaran hutan dan lahan, berkonflik dengan masyarakat, izin korporasi sudah dicabut, hingga perusahaan dianggap sudah dianggap melakukan tindakan pemadaman api. Alasan tersebut yang menjadi dasar dikeluarkannya SP3 kepada 15 korporasi. 15 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan

⁶¹ Wawancara dengan Pak Bruno selaku ketua komunitas Desa pungkat pada 3 September 2017 pukul 14.00 WIB.

⁶² Laporan Investigasi Jikalahari 2016, *“TEMPIAS: Dari Jikalahari Untuk Hutan dan Rakyat”*.

yaitu PT. Bina Duta Laksana, PT. Ruas Utama Jaya, PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT. Suntara Gajah Pati, PT. Dexter Perkasa Industri, PT. Siak Raya Timber, PT. Sumatra Riang Lestari, PT. Bukit Raya Pelalawan, PT. Hutani Sola Lestari, PT. Rimba Lazuardi, PT. PAN United, PT. Parwira, PT. Alam Sari Lestari, PT. Riau Jaya Utama, KUD. Bina Jaya Utama.

“Kami menilai penerbitan SP3 tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tanpa memberikan kejelasan kepada publik secara jelas, dan seharusnya perusahaanlah yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Kalau didiamkan, hutan di Riau akan habis dalam 15 tahun lagi. Sekarang aja sudah 3.3 juta hektar yang tersisa. Kami berusaha untuk terus mendesak Kapolda Riau untuk segera mencabut SP3 itu dan udah jelas ini melanggar instruksi Presiden”⁶³

Selain itu, alasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dan masyarakat menolak SP3 tersebut karena bertentangan dengan intruksi Presiden, yakni Instruksi Presiden atau Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Instruksi pada 18 Januari 2016 saat Presiden Joko Widodo Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara yang salah satu isinya menegakkan hukum. Dan SP3 juga dianggap menciderai keadilan masyarakat Riau. Hal ini menggerakkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta aktivis lingkungan untuk mengadakan aksi penolakan SP3 di depan Kantor Polda Riau. Dalam aksi ini, Wahana Lingkungan Hidup Indoensia Riau dan aktivis lingkungan menyerukan penolakan dan terhadap SP3 yang diterbitkan oleh Kapolda Riau melalui tulisan spanduk dan orasi di depan Kantor Polda Riau.

⁶³ Wawancara dengan Pak Tony salah satu staf WALHI Riau pada 7 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

Gambar 4.3

Gerakan Aksi masyarakat menuntut penolakan SP3 di depan Polda

Riau



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 4.4

Gerakan aksi masyarakat menuntut penolakan SP3 didepan kantor Polda

Riau



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017.

4.1.4 Gambaran Umum Gerakan Melawan Kerusakan Ekologis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu jantung perekonomian di Provinsi Riau yang seketika lumpuh selama kabut asap melanda akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Dinas Kehutanan Riau, sebanyak 12 perusahaan Hutan Tanaman Industri yang terlibat membakar lahan di Riau telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sudah sewajarnya yang berwenang memberikan sanksi administratif maupun upaya hukum lantaran izin perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Pada 11 Januari 2015 titik api muncul dan menyebar ke 10 Kabupaten di Provinsi Riau. Areal yang terbakar berada di dalam konsesi perusahaan yang memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶⁴ Titik api telah menyebabkan semakin meluasnya area kebakaran sehingga menimbulkan kabut asap dan mencemari lingkungan. Akibatnya kualitas udara di Kota Pekanbaru saat itu pada level berbahaya akibatnya masyarakat umum jadi korban kelestarian lingkungan terancam.

Tercemarnya lingkungan dan banyak korban menderita gangguan pernapasan akibat kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan membuktikan pemerintah daerah khususnya, kurang tegas dalam melakukan tugas dan pengawasan dan bertentangan dengan pasal 72 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota wajib melakukan

⁶⁴ Jikalauhari Magazine, Edisi September-Desember 2015, hlm. 3

pengawasan ketat terhadap izin lingkungan.⁶⁵ Izin yang diberikan juga tidak sempurna, karena lahan yang terbakar merupakan wilayah gambut dalam, ini bertentangan dengan pasal 5 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga Permentan 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut dan untuk budidaya kelapa sawit.⁶⁶

Sejak pertengahan Agustus 2015, kualitas udara di Riau mulai tidak sehat. Pada awal asap mulai terlihat pekat di Riau, terdata 687 hotspot atau titik api di bulan Agustus dan hotspot terus bertambah pada bulan September hingga mencapai 1.862 hotspot.⁶⁷ Paparan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU tidak menunjukkan kualitas udara dalam taraf baik untuk dihirup. Udara dalam kategori tidak sehat sempat ditunjukkan pada pertengahan Agustus lalu dan terus meningkat hingga level berbahaya. ISPU yang menunjukkan level berbahaya terus bertahan hingga berminggu minggu lamanya.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5

Gambar 4.5

ISPU menunjukkan kualitas udara dalam level berbahaya



Sumber: Dokumentasi penulis, 2015

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45/MENLH/10/1997 menjelaskan tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Jika ISPU menunjukkan kategori tidak sehat, kualitas udara merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif.⁶⁸ Ini dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Satu tingkat lebih tinggi, dimana angka 200-299 tertera di ISPU menunjukkan level sangat tidak sehat. Hal ini berarti kualitas udara merugikan kesehatan sejumlah segmen populasi yang terpapar.⁶⁹ Dan pada level berbahaya, berarti angka ISPU lebih dari 300 maka kualitas udara dapat merugikan kesehatan secara serius.

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tercatat bahwa 81.514 warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA. Korban yang mengalami

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

iritasimata sebanyak 4.677 orang, korban yang mengalami iritasi kulit sebanyak 5.899 orang. Sedangkan menderita asma dan pneumonia mencapai 3.744 dan 1.305 orang. Dan 5 warga Riau meninggal dipicu oleh asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 4.6

Data masyarakat yang terserang penyakit akibat kabut asap



Kab/kota	ISPA	Pneu	Asma	Mata	Kulit	Total
Dumai	6,703	75	236	109	469	7,592
Indragiri Hilir	2,287	31	106	317	346	3,087
Kampar	2,937	11	114	69	200	3,331
Rokan Hulu	5,561	9	391	631	505	7,097
Siak	7,129	273	353	358	909	9,022
Meranti	1,134	27	76	10	45	1,292
Bengkalis	6,595	334	508	536	418	8,391
Pelalawan	2,471	82	105	178	229	3,065
Rokan Hilir	2,799	134	135	374	490	3,932
Kuarising	7,014	4	440	455	338	8,251
Indragiri Hulu	6,971	1	217	226	336	7,751
Pekanbaru	14,633	95	392	430	572	15,122
Total Saat	66,234	1,076	3,073	3,693	4,857	78,833

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2015.

Kebarakan hutan dan lahan yang menjadi masalah di Riau tidak hanya disebabkan oleh pelaku pembakaran yang patuh dan tidak patuhnya terhadap hukum, namun juga adanya pengabaian oleh pemerintah. Api yang sudah menghabiskan ratusan bahkan ribuan hektar hutan dan lahan tidak segera dihentikan sehingga kebakaran terus meluas dan tidak kunjung padam. Melihat lambatnya respon pemerintah daerah terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, masyarakat segera menyuarakan aspirasi mereka baik melalui media sosial maupun langsung menyuarakan lewat aksi demo di jalan.

BAB V

GERAKAN SOSIAL WALHI DALAM MELAWAN KERUSAKAN EKOLOGIS

5.1 Gerakan Sosial Baru WALHI Riau Melawan Kerusakan Ekologis

a. Ideologi dan Tujuan

Salah satu karakteristik gerakan sosial baru adalah pandangan ideologi yang berbeda. Paradigma gerakan sosial baru mencatat bahwa gerakan sosial kontemporer merepresentasikan keterpusatan dari gerakan era industrial.⁷⁰ Pichardo menjelaskan Gerakan Sosial Baru memberikan penekanan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup. Sifat dari ideologi gerakan sosial baru yang merupakan karakter refleksi diri yang artinya partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan. Hal tersebut telah mengarahkan kepada pilihan sadar tentang struktur dan aksi yang merupakan pilihan kata untuk melambangkan gerakan sosial baru. Tujuan dari gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau diantaranya sebagai wadah koalisi dari berbagai komunitas yang peduli terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup, mewujudkan perilaku masyarakat yang ramah terhadap lingkungan, dan meningkatkan gerakan lingkungan yang nyaman.

“WALHI ini tidak hanya organisasi non pemerintah yang bergerak dalam lingkungan hidup dan mengawal kebijakan pemerintah tapi juga kami berusaha mewujudkan perilaku masyarakat yang ramah lingkungan kayak

⁷⁰ Oman Sukmana (2016), “*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*”, Malang: Intrans Publishing, hlm. 119

misalnya mengurangi penggunaan plastik, dan lainnya. Dan ini sudah kami terapkan di Kantor”⁷¹

Gambar 5.1

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau saat memperingati Hari Bumi



Sumber: Dokumentasi penulis, 2017.

Penulis menemukan dan melihat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau bersama komunitas lingkungan mengadakan kolaborasi aksi dalam rangka memperingati hari bumi 2017 yang berlokasi di sungai sail, Kecamatan Harapan Raya Kota Pekanbaru dengan tema “Save Earth, Save Humanity”. Melalui kegiatan ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan sungai untuk tetap menjaga sungai sail yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk mendukung tujuan dari gerakan tersebut, Wahana lingkungan Hidup Indonesia juga berkampanye untuk merubah gaya hidup masyarakat. Seperti mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, hemat dalam

⁷¹ Wawancara dengan Pak Tony selaku salah satu staf WALHI Riau pada 7 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

penggunaan listrik dan air, hemat kertas dan juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon.

b. Taktik dan Pengorganisasian

Pada taktik ini Pichardo menjelaskan bahwa taktik dalam gerakan sosial baru merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gerakan sosial baru lebih suka untuk tetap berada diluar saluran politik normal dan menggunakan taktik yang mengganggu dan juga memobilisasi opini publik. Gerakan sosial baru cenderung menggunakan demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum.

Taktik dan pengorganisasian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dalam melakukan gerakan sosial yang Penulis temukan yakni berusaha untuk mempengaruhi opini publik serta memobilisasi opini publik seperti yang dijelaskan oleh Pichardo. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang dinilai cukup dramatis. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberantas tekanan kelompok politik. Mereka lebih suka untuk berada di luar saluran politik normal.

“Tapi ini bukan berarti kami tidak melibatkan diri dalam politik, kami melakukannya dengan bentuk wujud dari protes kelas menengah. Ya kayak aksi-aksi yang kita lakukan beberapa waktu lalu di depan institusi pemerintah”⁷²

⁷² Wawancara pada salah satu staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau pada 7 Agustus 2017 pukul 11.00 WIB.

Gambar 5.2

WALHI Riau bersama masyarakat melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017.

Berdasarkan gambar diatas, WALHI Riau sempat melakukan aksi menolak Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterbitkan oleh Kapolda Riau kepada 15 perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan di Provinsi Riau. Gerakan aksi yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau tersebut merupakan cerminan orientasi ideologi yang juga menolak terhadap tindakan perusakan lingkungan hidup. Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam aksi penolakan SP3 tersebut sudah direncanakan sebelum melakukan kegiatan aksi dan menggunakan

atribut serta simbol sebagai representasi atas apa yang disampaikan ketika aksi berlangsung.

c. Partisipan dan Aktor

Pichardo berpendapat bahwa terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam gerakan sosial baru, yang pertama yakni dukungan dari kelas menengah baru atau sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pasca-industri membangun basis dukungan partisipan gerakan sosial baru. Dukungan kelas menengah terhadap gerakan sosial baru lebih muncul dari mereka yang cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung pada pengeluaran Negara seperti akademisi, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan, dan mereka cenderung harus berpendidikan tinggi. Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atau isu-isu sosial. Basis partisipan gerakan sosial baru adalah ideologi, bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas. Mereka didefinisikan oleh nilai-nilai umum daripada struktur lokasi.

Partisipan dan aktor yang bergabung dalam gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau adalah masyarakat umum dan mahasiswa yang bersifat volunteer. Diantaranya Dosen, Pengacara, Dokter, dan lainnya. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa benar adanya jika Pichardo mengatakan bahwa mereka yang tergabung sebagai partisipan gerakan sosial baru cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung pada pengeluaran Negara seperti akademisi, seniman dan agen-agen pelayanan

kemanusiaan lainnya. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang mayoritas partisipannya berasal dari aspek gender, okupasi dan kelas. Berbeda dengan gerakan sosial lama, gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau partisipannya berasal dari berbagai basis sosial yang melintasi kategori seperti pendidikan, gender, okupasi, dan kelas. Aktornya berasal dari kaum intelektual, kelas menengah, mahasiswa dan akademisi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau juga melakukan kampanye baik kampanye di media sosial maupun diluar media sosial, bersifat tanggap isu atau melakukan aksi cepat, fokus terhadap isu-isu lingkungan. Hal ini dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau sebagai upaya untuk terus peka terhadap isu-isu lingkungan dan mengkampanyekan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satunya dengan cara memanfaatkan media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai oleh pemanfaatan media baru sebagai media komunikasi, baik di kalangan pemerintah, kelembagaan politik maupun di kalangan masyarakat. Media sosial adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi dan menciptakan jejaring sosial maupun forum. Beberapa media sosial yang tengah berkembang saat ini seperti *Facebook*, *YouTube*, dan *Twitter*.

Gambar 5.3

Akun Facebook Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau



Sumber: Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 5.4

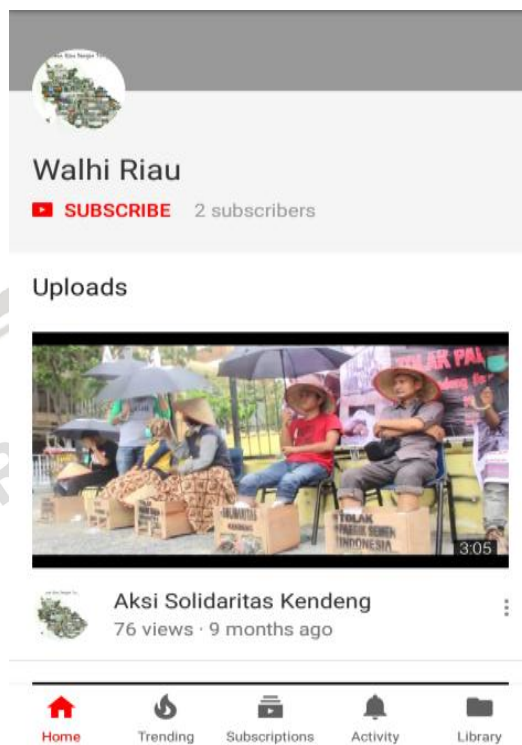
Akun Twitter Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau



Sumber: Dokumentasi penulis, 2018.

Gambar 5.5

Akun YouTube Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018.

Gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau tidak lagi menganut model pengorganisasian seperti model partai politik ataupun serikat buruh industri. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau memilih memobilisasi opini publik dan bertujuan untuk mendapatkan perhatian secara luas dari publik. Media sosial yang dimanfaatkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau berperan penting dalam pengorganisasian dan merespon isu-isu dari masyarakat terutama isu-isu lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan visi dan misinya atas sumber-sumber kehidupan yang dikelola secara adil dan lestari khususnya warga Provinsi Riau Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia Riau perlu didukung oleh relawan dan aktivis lingkungan yang berdedikasi tinggi terhadap lingkungan. Untuk itu pembenahan dan pembinaan kepada Sumber Daya Manusia mutlak dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Berbagai upaya telah digunakan guna mewujudkan SDM yang mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Antara lain pengembangan kemampuan, mengadakan riset untuk menggambarkan tingkat perkembangan pelestarian lingkungan hidup serta memberikan gambaran masalah lingkungan yang kemungkinan besar akan dihadapi.

d. Struktur

Pichardo berpendapat bahwa sikap anti intuitif dari gerakan sosial baru juga meluas kepada cara mereka mengatur. Gerakan sosial baru berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintahan yang mereka inginkan yaitu mereka mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku yang menghindari bahaya oligarki. Mereka cenderung melakukan rotasi kepemimpinan, suara umum dalam semua isu, dan memiliki organisasi sementara yang tidak permanen. Mereka juga mendukung sikap anti birokrasi, berdebat melawan dengan apa yang mereka anggap karakter dehumanisasi dari birokrasi modern.

“jadi yang menginisiasi dari gerakan melawan asap ini adalah WALHI dan beberapa LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kemudian, beberapa mahasiswa Mapala yang memang sudah tergabung di WLAHI juga ikut”⁷³

Gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis tersebut diinisiasi oleh WALHI Riau dan beberapa LSM lainnya. WALHI Riau mengajak LSM-LSM, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan serta masyarakat untuk ikut bergabung dalam

⁷³ Wawancara dengan salah satu staf WALHI Riau pada 8 September 2017 pukul 16.00 WIB.

gerakan melawan asap tersebut. Gerakan tersebut dipimpin oleh salah satu staf WALHI Riau.

WALHI Riau sendiri struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu ada dalam berjalannya sebuah organisasi, baik itu dari sektor swasta, publik maupun pemerintahan. Hal tersebut tentu didukung juga oleh Visi dan Misi. Dengan adanya sebuah struktur organisasi, maka akan terlihat susunan dan pola kerja dari sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas, peran dan kewajibannya. Struktur organisasi berisikan gambaran terkait kerangka kerja yang ada dalam sebuah kelompok ataupun perusahaan. Sehingga akan membantu seseorang untuk mengetahui pola kerja sebuah organisasi ataupun untuk memudahkan orang baru dalam sebuah organisasi tersebut dalam beradaptasi. Berikut susunan struktur organisasi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau. Adapun visi dan misi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yaitu:

1. Visi

Visinya adalah “terwujudnya kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan yang dikelola secara adil dan lestari dengan mensinergikan berbagai elemen yang ada di Riau”

2. Misi

- Membangun organisasi yang akuntabel, kreatif, populer, profesional yang didukung strategi dan infrastruktur yang kuat, mandiri dan berbasis massa yang sadar dan aktif.

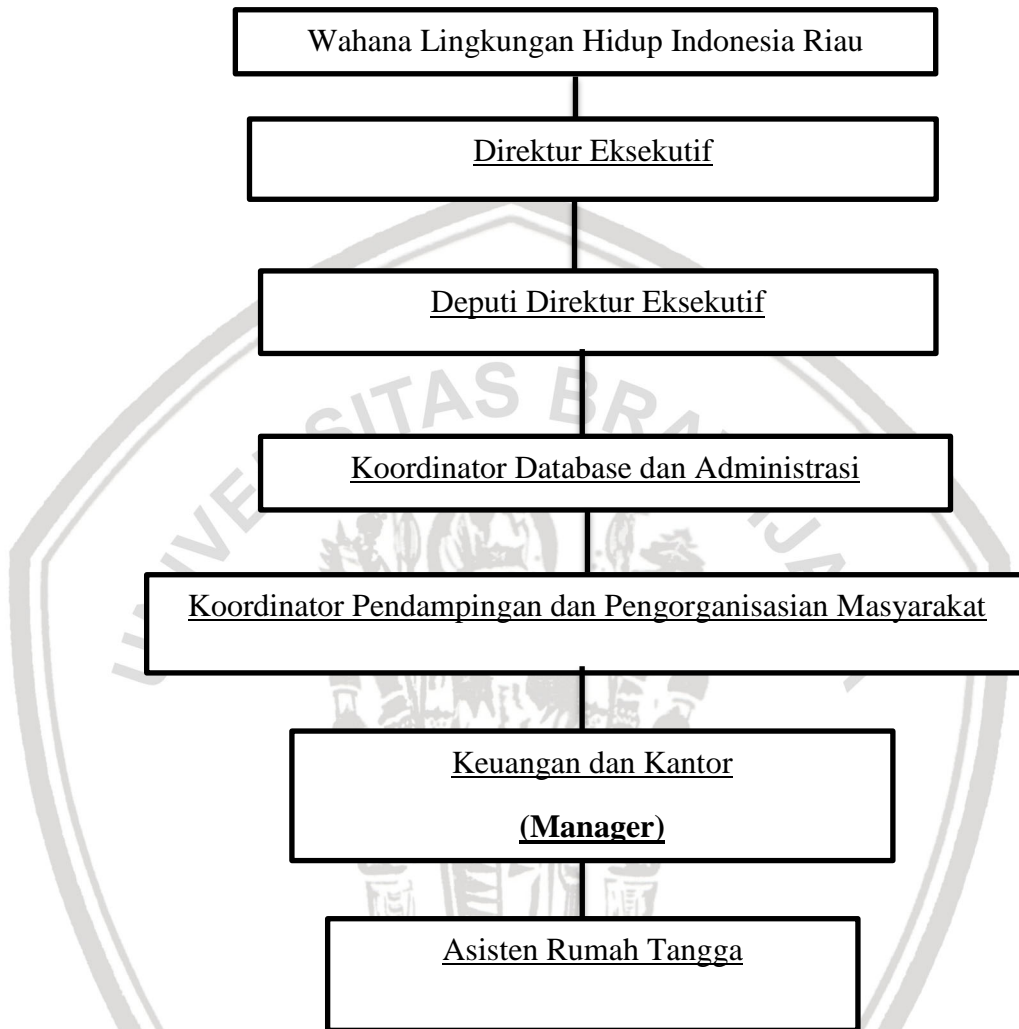
- Menjadikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yang didukung publik, organisasi kader serta memelopori gerakan lingkungan hidup yang massif.
- Mendesakkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan di Riau.
- Membangun organisasi rakyat yang kritis, sadar, aktif dan mandiri. Sebagai wahana bersama Organisasi Non Pemerintah (Ornop)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau senantiasa berupaya mendorong semua pihak untuk mendasarkan orientasi gerakannya pada nilai-nilai: demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, kesetaraan spesies, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas, anti kekerasan, etika kerja non partisan, keterbukaan, keswadayaan dan profesionalisme.

3. Kebijakan Mutu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia juga akan terus berusaha memainkan peran optimal mendorong transformasi sosial bagi pemantapan upaya pengelolaan SDA dan pemanfaatan secara lestari sumber-sumber kehidupan serta perlindungan hak-hak asasi manusia dalam suatu tatanan kehidupan yang berkeadilan dan lestari.

Bagan 5.1

Bagan Struktur Organisasi WALHI Riau



Sumber: Data diolah penulis, 2018.

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang langsung bertanggung jawab kepada Deputi Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Direktur Eksekutif dibantu oleh Koordinator Data Base dan

Administrasi. Adapun tugas dan peran dari masing-masing struktur organisasi yakni:

1. **Direktur Eksekutif:** Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis organisasi, menjaga dan membentuk hubungan keorganisasian internal dan eksternal, serta mengontrol manajemen kantor dan keuangan.
2. **Deputi Direktur Eksekutif:** Melakukan advokasi litigasi dan non litigasi, back up kerja advokasi dan pengorganisasian masyarakat, penyusunan program reporting, back up tugas-tugas Direktur Eksekutif Daerah, serta mengontrol dan terlibat dalam program yang sedang berjalan.
3. **Koordinator Data Base dan Administrasi:** Back up tugas-tugas kampanye dengan sosial media, surat menyurat berikut pengarsipan, mendokumentasikan laporan program dan kantor, monitoring kinerja sesuai visi dan misi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, serta database korporasi dan penggunaan lahan sesuai satuan statuta.
4. **Koordinator Advokasi dan Pengorganisasian Masyarakat:** Konsolidasi masyarakat dampingan, pendataan daerah-daerah yang diorganisir maupun diintervensi melalui program, pendataan data monografi desa, melakukan kerja advokasi dan pengorganisasian dalam bentuk aksi maupun bentuk kampanye terbuka, mendokumentasikan hal-hal yang diperoleh dari lapangan, serta memastikan kesiapan laporan kliping mingguan dan bulanan.
5. **Kuangan dan Kantor:** Penyusunan anggaran bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun, penyusunan laporan keuangan kantor secara periodik, mengontrol pencairan dan penggunaan anggaran, penyusunan rencana dan

laporan keuangan program, pengarsipan bukti-bukti keuangan perjalanan dinas, serta melakukan pembayaran biaya rutin kantor.

6. Assistant Rumah Tangga: Memastikan kantor dalam keadaan bersih dan rapi pada jam kerja dan jam pulang kantor.

Gerakan melawan kerusakan ekologis merupakan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat. Gerakan tersebut dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau bersama lembaga adat dan Organisasi Non pemerintah lainnya. Diantaranya Rumah Sikukeluang, Jikalahari dan Seruni. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa masyarakat sudah jengah dengan kondisi kabut asap yang terjadi selama bertaun-tahun akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau tanpa ada solusi yang konkrit. Gerakan melawan asap juga diinisiasi oleh berbagai tokoh Riau. Berbagai elemen masyarakat Riau seperti kalangan Akademisi, Aktivis Lingkungan, Dosen, Dokter, relawan dan lainnya sepakat untuk membuat sebuah gerakan sosial melawan kerusakan ekologis.

5.2 Dampak Gerakan Sosial Baru WALHI Riau Terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Setiap gerakan sosial yang dilakukan tentunya memiliki sebuah tujuan agar dapat melakukan sebuah perubahan dan tentunya berorientasi terhadap masyarakat. Gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau bertujuan untuk menuntut pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap yang terjadi di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan yang berdampak polusi asap di Riau ini sebenarnya juga melahirkan

dampak positif terkait dengan perlawanan-perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap di Riau, sebelumnya, belum pernah terbangun suatu gerakan bersama antara berbagai elemen masyarakat yang secara luas melakukan aksi demonstrasi serentak untuk menolak asap akibat praktik buruk tata kelola lingkungan hidup. Pada 2014, berbagai elemen masyarakat berkumpul dan bersepakat melakukan perlawanan bersama dengan membentuk forum Melawan Asap. Bahkan di media sosial nama forum tersebut dibuat menjadi *hashtag* dengan nama yang sama (#MelawanAsap) sebagai penanda gerakan. 2014 berlalu, ketika asap kembali berulang di Riau tahun 2015, gerakan Melawan Asap kembali melakukan aksi-aksi penolakan dan perlawanan, bahkan koalisi yang bersifat terbuka ini menjadikan gerakan baru yang jauh lebih besar dari berbagai komunitas dan kelompok yang bersuara dengan isu yang sama. Dengan adanya gerakan sosial tersebut, masyarakat jadi terkonsolidasi untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat mengetahui kalau mereka berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Gerakan masyarakat ini juga aktif menggalang dukungan bagi proses evakuasi selama bencana kabut asap dan juga mendirikan posko pengaduan dan kampanye. Dukungan lain juga hadir melalui Gerakan Satu Juta Masker bersama Humanitarian Forum Indonesia (HFI)

Gambar 5.6

Masyarakat ikut menyuarakan aksi protes terhadap pemerintah



Sumber: Dokumentasi WALHI Riau, 2015.

Gambar 5.7

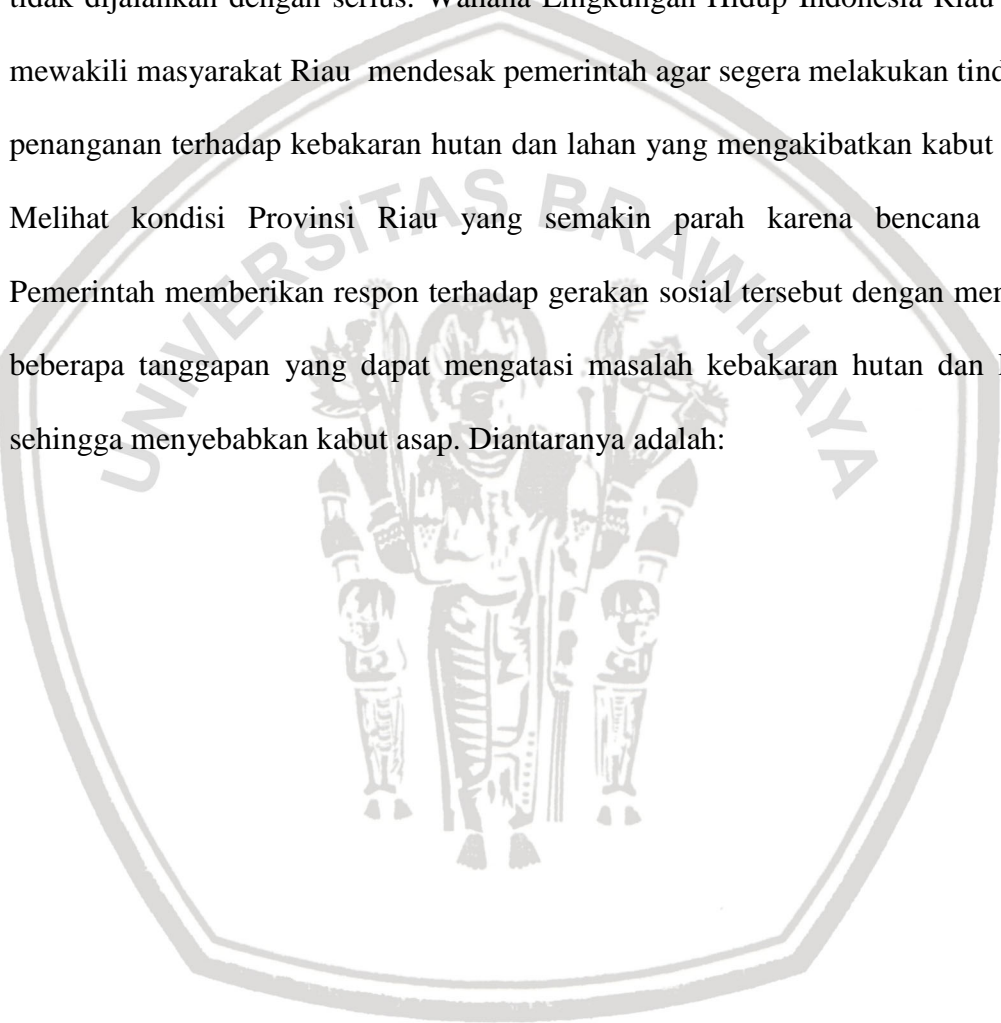
Masyarakat melakukan aksi melawan kerusakan ekologis



Sumber: Dokumentasi WALHI Riau, 2015.

Gerakan melawan kerusakan ekologis yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dilatarbelakangi akibat lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap pada tahun 2015 telah mendorong masyarakat untuk ikut bereaksi dan terlibat langsung di hampir seluruh proses penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap. Seperti pengumpulan data *hotspot* untuk disebarkekan ke publik, advokasi dan pelaporan kasus baik kasus pidana, perdata, maupun administrasi.

Keresahan dari masyarakat, dampak dari kabut asap juga tidak luput dari perhatian LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, memberi masukan dan kritik kepada Pemerintah untuk mampu lebih serius dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan di Riau, karena beragam dampak negatif yang akan muncul saat ini dan kedepan jika pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dijalankan dengan serius. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau yang mewakili masyarakat Riau mendesak pemerintah agar segera melakukan tindakan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap. Melihat kondisi Provinsi Riau yang semakin parah karena bencana asap, Pemerintah memberikan respon terhadap gerakan sosial tersebut dengan memberi beberapa tanggapan yang dapat mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap. Diantaranya adalah:



1. Pemadaman titik *hotspot* atau titik api.

Tabel 5.1

1. **REKAPITULASI PANTAUAN HOTSPOT
SATELIT NOAA.18**

NO	Wilayah Hotspot	JAN 2015	FEB 2015	MAR 2015	APR 2015	MEI 2015	JUNI 2015	JULI 2015	AGUS 2015	SEPT 2015	OKTO 2015	NOV 2015	Total Hotspot Per Kab/Kota
1	Rohil	6	11	24	3	4	25	61	3	4	-	-	142
2	Rohul	2	8	5	2	2	7	26	10	7	-	-	69
3	Dumai	-	5	10	7	-	6	20	3	3	-	-	54
4	Bengkalis	6	66	85	28	7	13	32	9	12	7	-	266
5	Meranti	5	2	20	-	1	-	1	-	-	5	-	34
6	Siak	4	8	12	2	2	3	21	9	18	12	-	91
7	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
8	Kampar	7	11	7	2	13	7	64	21	21	1	-	154
9	Pelalawan	40	32	17	-	20	39	139	63	106	20	-	476
10	Inhu	29	12	1	-	10	15	76	63	124	34	-	364
11	Inhil	10	12	2	-	6	8	37	11	54	36	1	177
12	Kuansing	13	9	2	1	9	17	41	8	15	1	2	119
TOTAL RIAU		122	176	185	45	74	140	520	201	364	116	3	1949

Sumber: BPBD Riau, 2015.

Dari rekapitulasi diatas, pemadaman titik api di 12 Kabupaten yang ada di Riau yang menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan. Terlihat dalam data rekapitulasi titik api yang terhitung mulai dari Januari 2015 sampai November 2015 telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Januari 2015

terdapat 122 titik api, pada Februari 2015 terdapat 17 titik api, pada Maret 2015 terdapat 185 titik api, April 2015 terdapat 45 titik api, Mei 2015 terdapat 74 titik api, Juni 2015 terdapat 140 titik api, Juli 2015 terdapat 520 titik api, Agustus 2015 terdapat 201 titik api, September 2015 terdapat 364 titik api, Oktober 2015 terdapat 116 titik api, dan November 2015 terdapat 3 titik api.

Pemadaman titik api tersebut dilakukan dengan cara *Water Bombing*, pemadaman di darat, dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan. Teknik *water bombing* dilakukan dengan cara membawa air ke udara menggunakan helikopter dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu BELL (PK - KIE) dan MI - 171 (UR-CMU), yang kemudian air tersebut di jatuhkan dari udara di atas titik api di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman di darat dilakukan oleh tim pemadam kebakaran yang langsung datang ke lokasi kebakaran hutan dan lahan untuk memadamkan titik api. Kemudian Teknologi Modifikasi Cuaca dilakukan dengan syarat yakni harus ada awan-awan yang potensial untuk disemai dan memunculkan hujan. Pemadaman dengan Teknologi Modifikasi Cuaca ini sempat terdapat kendala karena buruknya kondisi langit akibat kabut asap sehingga tidak adanya awan yang potensial. Ini juga menjadi penyebab tidak turunnya hujan deras akibat kondisi alam yang kering. Rekayasa cuaca ini memang tidak mudah dilakukan di tengah kabut asap yang tebal. Lapisan asap menghambat pertumbuhan awan. Uap air di atmosfer diserap oleh butir-butir asap sehingga sulit membentuk awan. Adapun cara kerja Teknologi Modifikasi Cuaca yaitu dengan penyemaian awan menggunakan bahan-bahan yang bersifat menyerap air yaitu dengan menebar puluhan ton garam ke udara yang ditebar ke awan yang berpotensi memunculkan hujan sehingga proses

pertumbuhan butir-butir hujan dalam awan akan meningkat dan selanjutnya akan mempercepat terjadinya hujan.

2. Perkembangan Indeks Pencemaran Udara.

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) merupakan angka tidak bersatuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di suatu lokasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, penetapan kriteria ISPU didasarkan pada dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Konsep indeks ini telah dijadikan rujukan dan sekarang telah diundangkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997.

Tabel 5.2
Indeks Standar Pencemaran Kualitas Udara

KEPMEN LH NO. KEP-45/MENLH/10/1997 TENTANG ISPU	
BAIK (GOOD)	0-50 (Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan maupun nilai estetika)
SEDANG (MODERATE)	51-100 (Tingkat Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika)
TIDAK SEHAT (UNHEALTHY)	101-199 (Tingkat Kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika)
SANGAT TIDAK SEHAT (VERY UNHEALTHY)	200-299 (Tingkat Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar)
BERBAHAYA (HAZARDOUS)	300 lebih (Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi)

NO	Wilayah (ISPU)	PERKEMBANGAN INDEX STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)																													
		September																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Rumbai (Pekanbaru)	164	431	237	>500	228	81	241	248	110	161	>500	261	192	>500	266	>500	317	441	100	61	67	334	96	94	214	>500	>500	173	414	120
2	Minas (Siak)	176	>500	379	>500	197	122	137	447	99	150	499	329	423	>500	349	257	327	>500	105	70	70	165	91	51	181	365	268	97	>500	207
3	Duri Camp (Bengkalis)	256	268	179	463	146	136	207	294	54	71	261	485	>500	351	74	176	>500	>500	109	92	51	101	64	67	106	404	260	49	419	188
4	Duri Field (Bengkalis)	270	244	231	364	94	126	143	228	55	85	192	449	>500	290	67	175	>500	>500	66	61	65	103	50	62	125	397	256	43	361	159
5	Dumai	123	167	167	199	73	130	148	307	81	104	182	190	>500	>500	37	191	123	64	71	52	55	111	52	71	71	456	163	59	454	138
6	PKU Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PKU Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kandis (Kampar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Perawang (Siak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bangko (Rohil)	138	198	17	234	76	126	126	119	65	20	279	392	>500	65	15	113	325	325	36	58	52	63	31	66	32	181	114	22	372	115
12	Libo (Rohil)	127	409	435	457	309	139	104	478	52	56	302	287	167	414	215	197	327	>500	134	80	40	86	59	52	54	467	238	65	326	>500
13	Panam (Pekanbaru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Petapahan (Kampar)	127	345	217	233	171	135	148	170	83	156	396	162	107	32	251	160	133	169	183	90	52	129	61	88	154	491	484	108	321	>500
15	P.Pengaraian (Rohul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Wilayah (ISPU)	PERKEMBANGAN INDEX STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)																														
		Oktober																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Rumbai (Pekanbaru)	311	143	435	>500	>500	>500	169	93	103	144	186	122	165	53	95	118	161	438	366	>500	>500	>500	>500	464	169	225	317	121	55	42	42
2	Minas (Siak)	192	162	463	>500	357	>500	150	100	109	151	185	123	171	63	95	116	90	371	>500	416	>500	>500	>500	251	161	149	311	97	39	34	37
3	Duri Camp (Bengkalis)	65	132	336	>500	274	499	102	70	103	104	128	125	154	93	108	85	153	212	329	>500	>500	135	>500	230	165	112	183	56	33	31	25
4	Duri Field (Bengkalis)	65	154	311	>500	228	450	97	57	82	96	124	119	150	74	98	89	133	280	336	>500	>500	154	>500	189	137	112	163	48	29	27	16
5	Dumai	114	117	270	385	208	215	52	52	56	70	84	96	88	70	75	59	90	330	139	>500	442	105	125	114	96	95	100	52	45	52	28
6	PKU Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PKU Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kandis (Kampar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Perawang (Siak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bangko (Rohil)	139	189	297	>500	410	360	33	74	124	75	114	77	58	75	58	72	121	193	293	475	>500	171	>500	162	106	102	181	62	32	20	12
12	Libo (Rohil)	227	111	304	>500	399	438	128	89	133	122	182	144	166	89	155	100	106	194	>500	394	>500	189	>500	467	155	326	297	105	61	28	23
13	Panam (Pekanbaru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Petapahan (Kampar)	202	86	446	331	492	>500	123	100	160	128	147	165	175	71	126	108	127	185	>500	235	>500	>500	>500	>500	204	211	254	131	61	49	21
15	P.Pengaraian (Rohul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Wilayah (ISPU)	PERKEMBANGAN INDEX STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)																														
		NOVEMBER																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Rumbai (Pekanbaru)	37	72	54	16	54	38	36	35	15	41	48	16	42	30	44	23	11	24	13	46	35	10	12	13	24	13	51	53	-	45	
2	Minas (Siak)	44	46	46	12	50	43	30	30	10	36	50	9	24	31	16	22	11	25	29	43	52	14	30	24	29	12	86	35	-	15	
3	Duri Camp (Bengkalis)	26	59	53	58	39	25	25	16	20	42	39	43	16	51	-	-	19	34	51	27	33	9	33	20	41	18	52	-	-	51	
4	Duri Field (Bengkalis)	32	55	42	51	52	31	-	11	27	28	42	34	-	52	55	25	54	61	60	43	40	39	43	37	57	51	60	49	-	25	
5	Dumai	33	37	33	51	38	33	22	-	27	28	32	12	25	21	-	9	2	33	53	16	36	38	32	11	49	-	11	-	-	31	
6	PKU Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PKU Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kandis (Kampar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Perawang (Siak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bangko (Rohil)	24	53	22	29	29	47	35	28	33	28	39	10	15	51	48	9	2	26	22	23	52	-	-	52	26	-	-	11	-	6	
12	Libo (Rohil)	35	65	46	50	48	42	45	25	43	73	95	52	22	-	-	15	20	24	34	10	-	56	21	37	32	25	-	-	-	-	
13	Panam (Pekanbaru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Petapahan (Kampar)	22	66	51	27	55	23	-	14	-	40	-	10	20	24	32	-	14	44	45	-	-	-	9	45	27	-	31	11	-	28	
15	P.Pengaraian (Rohul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD Riau, 2015

Menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau yang disebabkan kebakaran hutan dan kebakaran lahan, hingga pemanfaatan produksi masal yang tidak berasaskan kestabilan lingkungan terutama pada pengembangan lahan perkebunan sawit menjadi penyebab dominan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Riau selama ini. Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadi potensi utama kebakaran menjadi semakin parah. Lahan gambut yang diubah fungsinya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi kering dan sifat lahan gambut jika terbakar sulit untuk dipadamkan, karena kedalaman gambut di bawah tanah yang bisa mencapai belasan meter lebih. Struktur ekosistem gambut sebetulnya sudah dipahami oleh pemerintah Provinsi Riau, namun kebakaran masih saja terulang. Sehingga mengakibatkan bencana asap dan harus segera di cegah.

Upaya mitigasi atau manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang pertama adalah dengan mengeluarkan regulasi, Pemerintah daerah dalam upaya melakukan mitigasi bencana mengawali beberapa aksinya dengan membuat regulasi, yang mana regulasi tersebut mampu mengawali tindakan preventif lebih tersistematis sebab mengandung unsur hukum yang kuat dalam implementasinya yaitu melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Dengan intensitas kebakaran kebakaran yang terus terjadi

setiap tahun, dapat mendorong pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, untuk membentuk Badan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHTLA).

Terbentuknya Pusedakarhutla berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang akan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas Kabupaten/Kota. Rencana aksi Satuan Pelaksana Operasional (SATLAKOP) Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari keseriusan dari pemerintah daerah dalam menanganani bencana asap yang berkepanjangan. Pergub No 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini lahir melihat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di daerah Riau tetapi juga berakibat dari asap kabut tersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Lahirnya Pusedakarhutla menunjukkan akuntabilitas pada publik atau nilai-nilai publik dalam keseriusan pemerintah dalam melakukan mitigasi. Selanjutnya Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah hasil rencana tindak lanjut dari implementasi Peraturan Gubernur Riau No. 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini menyempurnakan rencana aksi organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut alur stakeholder yang terlibat. Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab dalam upaya pencegahan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yakni

membentuk satgas (satuan tugas) khusus dalam melakukan mitigasi dengan tetap mengacu pada Pusdakarhutla (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Perkembangannya Pusdalkarhutla berubah menjadi BPBD yang membentuk pos komando.

Pergub Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau bertujuan agar dijadikan pedoman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak, sehingga dibentuklah satgas. Melihat hal ini adalah semua elemen yang terlibat di Provinsi Riau terdiri dari departemen dan non departemen, aparat bahkan masyarakat lokal dalam hal ini merespon baik regulasi yang dituangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau tentunya Gubernur memberikan kebijakan yang di dalamnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terlibat dalam menanggulangi dan mencegah bencana asap yang berkepanjangan setiap tahunnya.

Hadirnya Pergub Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau melihat akar permasalahan dari frekuensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam lima tahun terakhir menyatakan ketidakmampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga berbagai kebijakan dalam meredakan bencana asap ini pun banyak melibatkan berbagai organisasi pemda terkait dan aparat. Bisa dilihat hadirnya regulasi ini memuat secara terpadu juga merespon kebijakan sebelumnya yaitu

Pusdakarhutla dengan pembentukan satgas agar lebih terkoordinatif dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

5.3 Faktor Keberhasilan Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis

Keberhasilan gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau mendapat dukungan dari masyarakat dan aktivis lingkungan dan mahasiswa. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Riau juga ikut melakukan aksi kampanye dan berbagi masker gratis kepada setiap pengendara sepeda motor. Mahasiswa juga tergabung dalam gerakan melawan kerusakan ekologis yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau bersama dengan LSM lainnya dalam melaksanakan aksi di depan gedung pemerintahan. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk kepedulian mereka terhadap bencana asap yang ditimbulkan akibat kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 5.8

Pembagian masker gratis kepada pengendara motor



Sumber: Dokumentasi WALHI Riau, 2015.

Tujuan dari gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis yaitu untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam aksi yang telah dilakukan, masa yang tergabung dalam gerakan melawan kerusakan ekologis menyuarakan aspirasi mereka melalui orasi dan spanduk atau properti lainnya. Mereka menyuarakan pemerintah untuk segera mengatasi kerusakan ekologis yang mengakibatkan kabut asap tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau juga menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk segera mengatasi hal tersebut.

Beberapa media yang meliput selama aksi gerakan melawan kerusakan ekologis berlangsung, juga turut menjadi faktor keberhasilan gerakan melawan kerusakan ekologis berhasil. Masyarakat dapat menerima informasi tentang adanya gerakan sosial melawan kerusakan ekologis di Riau melalui televisi, koran, majalah, internet dan radio. Hal ini juga tentunya membantu mendesak pemerintah untuk segera bertindak untuk menangani kerusakan ekologis yang mengakibatkan kabut asap tersebut.

Masa yang tergabung dalam gerakan sosial melawan kerusakan ekologis tidak hanya LSM namun juga Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), aktivis lingkungan, dokter, dosen, dan lapisan masyarakat lainnya. Hal itu menimbulkan citra positif terutama kepada masyarakat sehingga gerakan tersebut dapat meyakinkan tujuannya bahwa gerakan tersebut murni demi kepentingan masyarakat. Kondisi ini juga memudahkan untuk mendapat dukungan keyakinan dari publik.

“Seorang pemimpin dalam suatu organisasi Gerakan Sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial dapat berhasil”.

Faktor penting yang membuat kelompok atau partisipan lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok atau partisipan tersebut memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan atau established, terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok tersebut juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagi kepercayaan, symbol serta bahasa yang sama.

5.4 Faktor Penghambat Gerakan Sosial Baru Melawan Kerusakan Ekologis

Gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau juga terdapat adanya faktor yang menjadi penghambat selama menjalankan gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis tersebut yakni adanya beberapa massa yang melakukan tindakan memblok jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan mengundang kemarahan bagi pengendara yang ingin melintas. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat memberikan protes terhadap gerakan sosial melawan kerusakan ekologis tersebut. kemudian, sikap masyarakat yang masih tradisional dan konservatif atau enggan melakukan perubahan akan berdampak membawa mentalitas yang buruk dalam mendorong sebuah kemajuan.

“masyarakat kita ini masih banyak yang pola pemikirannya konservatif, mereka ingin perubahan yang lebih baik tapi mereka sendiri malas gerak. Kayak misalnya pas banjir beberapa waktu lalu masyarakat menyalahkan Pemerintah dan Dinas Kebersihan. Padahal kebiasaan masyarakat yang suka buang sampah ke sungai juga masih banyak. Kebiasaan itu juga yang enggan mereka rubah”⁷⁴

Karena itu, sikap seperti itu harus dihindari suatu perubahan dapat terlaksana.

Adanya nilai-nilai tradisional yang masih tertanam dalam masyarakat atau *Vested*

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Edward selaku seniman di Rumah Adat Sikukeluang tanggal 7 September 2017 pada 16.00 WIB.

Interest yang juga menghambat sebuah gerakan karena pada dasarnya suatu perubahan itu berusaha untuk meninggalkan nilai-nilai lama guna menuju pada nilai-nilai yang baru dan jauh lebih bermanfaat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Hambatan dalam gerakan melawan kerusakan ekologis tersebut juga karena berbenturan dengan ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat juga menghambat sebuah gerakan terjadi. Pola pikir yang masih terbelakang memunculkan sebuah pemikiran yang membuat masyarakat enggan berubah atau bergerak. Seperti masyarakat yang masih apatis. Gerakan melawan asap juga sempat mengalami kendala pada finansial.

“gerakan ini juga sempat mempertimbangkan rincian biaya yang akan dikeluarkan pada waktu itu. Karna kan gak mungkin kita pakai uang kantor (WALHI Riau) sepenuhnya dan massa yang tergabung juga ratusan orang, apalagi yang kita butuhkan juga banyak sekali kayak beli-beli properti, konsumsi dan lain-lain”⁷⁵

Biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk mendukung gerakan melawan kerusakan ekologis terutama biaya untuk konsumsi massa yang jumlahnya ratusan. Keterbatasan biaya tersebut dikarenakan banyaknya perlengkapan dan peralatan yang harus dibeli seperti perlengkapan untuk aksi teatrikal, spanduk, banner, cat, konsumsi untuk massa dan lainnya.

⁷⁵ Wawancara dengan salah satu staf WALHI Riau tanggal 9 September 2017 pada 12.00 WIB.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas yang menjelaskan tentang gerakan sosial baru yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konteks gerakan melawan asap yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau berperan penting dalam melakukan perubahan perbaikan pengelolaan hutan dan lahan gambut serta keberlangsungan hidup manusia yang diwujudkan dengan sebuah gerakan melawan asap oleh masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah agar segera bertindak mengatasi kerusakan ekologis di Riau.

Kedua, dalam melakukan gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis, gerakan tersebut dibantu oleh penguatan dari media sebagai alat untuk menyusun sebuah tindakan bersama untuk mendesak pemerintah agar tujuan dari gerakan tersebut bisa terwujud yakni mendesak agar pemerintah segera bertindak untuk segera mengatasi kerusakan ekologis di Riau.

Ketiga, gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis dibangun melalui mobilisasi sumberdaya, massa yang tergabung dalam gerakan tersebut mencakup seluruh okupasi masyarakat seperti mahasiswa, petani, dosen, akademisi, guru dan lainnya.

Keempat, wujud dari gerakan sosial baru melawan kerusakan ekologis yakni pemerintah melakukan pemadaman titik api di lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan cara *water bombing* dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sehingga titik api dapat berkurang secara signifikan dan berdampak pada berkurangnya kabut asap.

6.2 Saran

Pengalaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap yang telah terjadi sebelumnya seharusnya menjadikan pemerintah lebih proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi peristiwa tersebut. kebakaran hutan dan lahan yang berlarut-larut berimbas pada bencana asap yang menimbulkan kerugian berlipat ganda bagi negara serta mengancam kehidupan manusia dan ekosistem, terutama masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan lahan yang terbakar dan terpapar kabut asap. Penanganan kebakaran hutan dan lahan juga perlu segera ditangani untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam penegak hukum jika terdapat dugaan pada penyalahgunaan perizinan dan kesengajaan membakar hutan dan lahan. Penolakan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan ekologis kebakaran hutan dan lahan serta ulah manusia yang sengaja membakar hutan dan lahan di Provinsi Riau, disini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau lebih giat menyadarkan masyarakat melalui kampanye dan diskusi akan bahaya penggunaan api di areal lahan dan hutan gambut yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dan rusaknya lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- David Marsh & Gerry Stoker, 2012. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Lisa Harrison, 2016, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Budairi, 2002, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, E-Law Indoensia, Yogyakarta.
- Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing
- Samiaji Sarosa, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks

Dokumen:

- Dokumentasi Kajian WALHI 2016, “*Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding*”
- Catatan WALHI, “*Keadilan Ekologis Penguasaan dan Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Desa Pungkat*” 2016
- Laporan Investigasi Jikalahari, “*TEMPIAS: Dari Jikalahari Untuk Hutan dan Rakyat*”
- Wawancara dengan Pak Tony selaku Direktur Eksekutif WALHI Riau tanggal 7 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Pak Edward selaku seniman di Rumah Adat Sikukeluang tanggal 7 September 2017.
- Wawancara dengan staf WALHI Riau tanggal 9 September 2017.

Wawancara dengan Pak Bruno selaku ketua komunitas Desa Pungkat tanggal 3 September 2017.

Jurnal:

Vita Yuliarti, Irdyanti, "*Peran Dinas Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan di Kota Pekanbaru*" Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan. Vol.19, No.1 Januari-Juni 2016.

Suharko, "*Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 Nomor 1, Juli 2006, hlm 7.

Zomerren, "Journal Of Social Issues" Vol. 65 Nomor 4, 2009.

Majalah:

Jikalahari Megazine, Edisi September-Desember 2015

Tesis:

David Ardhian, "*Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)*" (Institut Pertanian Bogor, 2016).

Website:

Dimpos Manalu, "*Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*" Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12066>, pada tanggal 06 Oktober 2017 pukul 13:49

Uul Wulandari, "*Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau*" diakses dari http://www.academia.edu/8303058/PERKEMBANGAN_PERKEBUNAN

[KELAPA SAWIT DI PROPINSI RIAU](#), pada tanggal 17 April 2017
pukul 22:57 WIB

Jikalahari "*Fakta Kritis Analisia Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Riau*"
Diakses dari <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/fakta-kritis-analisa-tata-kelola-kehutanan-di-provinsi-riau/>, pada tanggal 17 April 2017 pukul
22:42

